

**ANALISIS DAMPAK MODAL TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
(Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Fajar Perdana Kurniawan

145020100111010

Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Dampak Modal Terhadap
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan
(Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo)**

Yang disusun oleh :

Nama : Fajar Perdana Kurniawan
NIM : 145020100111010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Desember 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 197403022005012001
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., M.A.
NIP. 195508151984031002
(Dosen Penguji I)
3. Atu Bagus Wiguna, S.E., ME.
NIP. 2016079101181001
(Dosen Penguji II)

Malang, 12 Desember 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
NIP 196503111989032001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fajar Perdana Kurniawan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Juni 1996
NIM : 145020100111010
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Sumber Daya
Alamat : Perumahan Dwiga Regency Blok B2 No. 4
Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Dampak Modal Terhadap
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan
(Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Desember 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP 197403022005012001

Yang membuat pernyataan,



Fajar Perdana Kurniawan
NIM 145020100111010

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

Riwayat Hidup

Nama : Fajar Perdana Kurniawan
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juni 1996
Agama : Islam
Nomor Telpon/ HP : 081249665820
Alamat Email : Perdana.fajar@yahoo.com
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Perumahan D'Wiga Blok B2 No. 4
Riwayat Pendidikan :

Sekolah/ Universitas	Jurusan	Tahun	IPK
TK Pertiwi	-	2000-2002	-
SD Negeri Pucang 1 Sidoarjo	-	2002-2008	-
SMP Negeri 2 Sidoarjo	-	2008-2011	-
SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo	IPS	2011-2014	-
Universitas Brawijaya	Ilmu Ekonomi	2014-2018	3,41

• **Pengalaman Organisasi :**

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
HMJIE	Staff Magang Divisi Media Informasi & Teknologi	2014
HMJIE	Staff Tetap Divisi Media dan Penerbitan	2015
TurunTangan Malang	Relawan Divisi Penelitian Pengembangan dan Gerakan	2017
TurunTangan Malang	Wakil Koordinator Umum	2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Dampak Modal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan (Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo) dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan.

Skripsi yang telah berhasil diselesaikan tentunya atas kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayah, dan ibu saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, materi, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Nurul Badriyah, SE., ME. Selaku dosen pembimbing sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi. Terima kasih banyak atas bimbingan serta masukan-masukannya baik dalam penulisan skripsi, maupun tuturan kata yang membuat kepribadian mahasiswanya menjadi lebih baik.
3. Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., M.A. Selaku dosen pembahas serta penguji sejak saya melakukan seminar proposal serta melakukan ujian komprehensif. Terima kasih banyak atas masukan-masukan yang sangat membangun untuk penelitian yang saya lakukan.
4. Bapak Atu Bagus Wiguna, S.E., ME. Selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif, serta Staff Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan masukan terkait tata cara penulisan yang baik.
5. Bapak Dian Sulung Rahmadani, S.STP., MA. selaku Staff Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan saya

inspirasi, ilmu, pengalaman, dan bantuan yang sangat berharga selama penulisan skripsi.

6. Teman-teman yang telah menemani saya selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meskipun semuanya telah mendahului saya untuk menyelesaikan studinya. Saya ucapkan terima kasih Aisyatul Maghfiroh, Areta Citamaha, dan Nanda Hikmatul Aulia.
7. Indah Larasati, selaku pendamping saya yang telah memberikan dukungan dan cukup sabar selama saya mengerjakan skripsi.

Semoga segala bentuk bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak akan bermanfaat bagi semua pihak.



Malang, 14 Desember 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fajar'.

Fajar Perdana Kurniawan

ANALISIS DAMPAK MODAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Fajar Perdana Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: fajarpdnn@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu unit usaha yang jumlahnya paling banyak di Indonesia adalah UMKM. UMKM merupakan salah satu unit yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, salah satu masalah utama yang dimiliki oleh UMKM adalah keterbatasan dalam permodalan. Salah satu hal yang dapat meningkatkan modal ialah melalui pembiayaan kredit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat masalah permodalan UMKM harus segera dibenahi dengan salah satu programnya yaitu dana bergulir. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dampak pembiayaan dana bergulir milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap perkembangan UMKM dilihat dari produksi, tenaga kerja, dan pendapatan.

Objek penelitian dari penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 30 UMKM. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer dari hasil kuesioner serta wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa uji normalitas beserta uji hipotesis/uji beda, yaitu uji T sampel berpasangan.

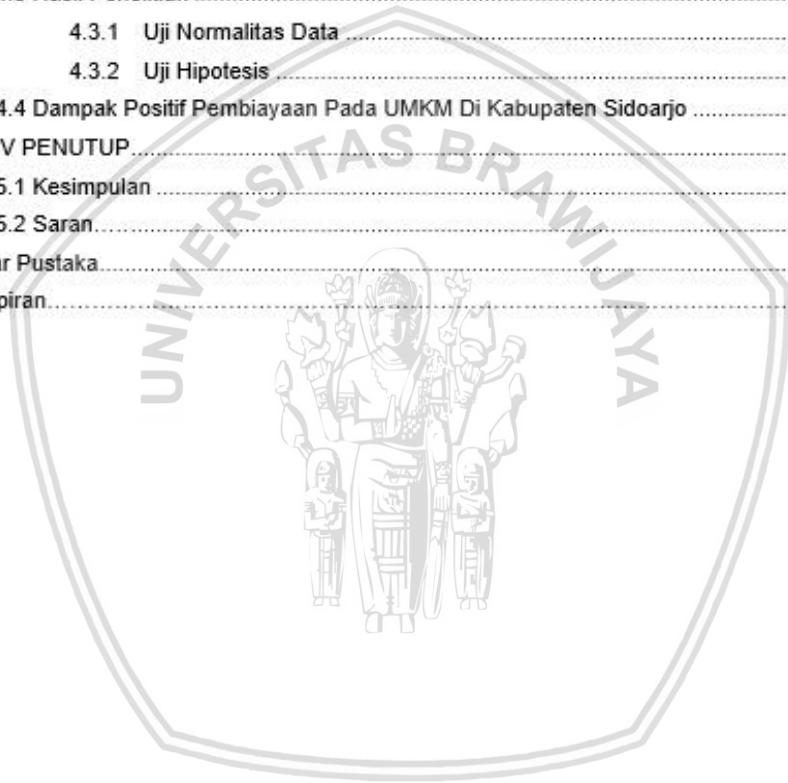
Berdasarkan hasil dari uji T sampel berpasangan, variabel produksi, tenaga kerja, dan pendapatan memiliki signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$). Artinya, dana bergulir memiliki dampak positif terhadap ketiga variabel yang diteliti. Selain itu, rata-rata produksi UMKM antara sebelum dan sesudah meminjam dana bergulir meningkat sebanyak 30%. Rata-rata tenaga kerja UMKM antara sebelum dan sesudah meminjam dana bergulir meningkat sebanyak 20%. Dan untuk pendapatan UMKM antara sebelum dan sesudah melakukan pinjaman dana bergulir meningkat sebanyak 32,75%.

Kata Kunci: UMKM, Modal, Pembiayaan, Pinjaman Kredit, Dana Bergulir, Provinsi Jawa Timur, Uji T Sampel Berpasangan.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia	14
2.2 JATIMNOMICS dan Pembiayaan UMKM; Solusi Permasalahan Modal 21	21
2.3 Modal, Produksi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Dalam Industri Pengolahan	32
2.4 Studi Terdahulu	43
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	46
2.6 Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.3 Definisi Operasional Variabel	50
3.4 Populasi dan Sampel	51
3.5 Data dan Sumber Data	53
3.5.1 Data	53
3.5.2 Sumber Data	54
3.6 Metode Analisis Data	54
3.6.1 Uji Normalitas	55
3.6.2 Uji Paired Sample T Test	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian	58

4.2 Responden Penelitian	65
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Modal	66
4.2.3 Karakteristik UMKM Berdasarkan Waktu Pinjaman	67
4.2.4 Karakteristik UMKM Berdasarkan Plafon Kredit	68
4.2.5 Karakteristik UMKM Berdasarkan Asal Kecamatan	70
4.2.6 Karakteristik UMKM Berdasarkan Jenis Usahanya	71
4.3 Hasil Penelitian	73
4.3.1 Uji Normalitas Data	73
4.3.2 Uji Hipotesis	74
4.4 Dampak Positif Pembiayaan Pada UMKM Di Kabupaten Sidoarjo	75
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	84
Daftar Pustaka	v
Lampiran	vii



Daftar Tabel

Tabel 1.1: Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar Tahun 2012-2013.....	3
Tabel 1.2: Tabel Perkembangan UMKM Tahun 2011-2013	4
Tabel 1.3: Jumlah Debitur Dana Bergulir Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota	10
Tabel 1.4: Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo (Posisi Desember 2017)	12
Tabel 2.1: Kriteria UMKM Menurut UU no. 20 Tahun 2008	16
Tabel 2.2: Sumber Permodalan Usaha Mikro dan Kecil	18
Tabel 3.1: Jumlah Sampel Penelitian	53
Tabel 4.1: Penduduk Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Mata Pencarian.....	58
Tabel 4.2: Rata-rata Produksi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan.....	78
Tabel 4.3: Ringkasan Hasil Penelitian	82

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia (Persen).....	15
Gambar 2.2: Kebijakan Fiskal dan Kurva Permintaan Agregat	25
Gambar 2.3: Piramida Strategi Fiskal Jawa Timur	29
Gambar 2.4: Kurva Produksi Total (TP), Produksi Rata-Rata (AP), dan Produksi Marjinal (MP)	36
Gambar 2.5: Kurva Produksi Sama (<i>Isoquant</i>)	37
Gambar 2.6: Kurva Biaya Sama (<i>Isocost</i>)	38
Gambar 4.1: Alur Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur	60
Gambar 4.2: Alur Calon Debitur Mendapatkan Pinjaman	62
Gambar 4.3: Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Sidoarjo	65
Gambar 4.4: Sumber Modal Awal Responden di Kabupaten Sidoarjo	66
Gambar 4.5: Waktu Pinjaman Dana Bergulir di Kabupaten Sidoarjo	68
Gambar 4.6: Plafon Kredit Responden di Kabupaten Sidoarjo	69
Gambar 4.7: Asal Kecamatan Responden di Kabupaten Sidoarjo	70
Gambar 4.8: Jenis Usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo	72
Gambar 4.9: Hasil Uji Normalitas	74
Gambar 4.10: Hasil Uji T Sampel Berpasangan	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara pasti memiliki sistem perekonomian. Sistem ekonomi yang ada di dunia terbagi menjadi 3 sistem. Sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi liberal yang juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar dan dipelopori oleh Adam Smith (Skousen. 2009:33). Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis yang dikenal dengan sistem ekonomi terpusat dan dipelopori oleh Karl Marx. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan antara sistem ekonomi liberal dan sosialis.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan nilai positif antara sistem ekonomi liberal dan sosialis (Hamid, Tanpa Tahun: 17). Dalam sistem ekonomi campuran, terdapat berbagai macam unsur dalam suatu negara yang membuat perekonomian negara tersebut menjadi baik dan berkembang. Salah satu indikator supaya perekonomian suatu negara dapat menjadi lebih baik yaitu melalui sektor usaha. Sektor usaha menyumbang porsi yang cukup besar terhadap PDB negara, hal tersebut merupakan salah satu unsur yang membuat pendapatan negara ikut meningkat.

Saat ini berbagai macam bentuk usaha mulai didirikan baik secara individu maupun oleh suatu kelompok. Bentuk usaha yang umum dan mudah dibuat oleh masyarakat umum yaitu usaha yang berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2016 kontribusi sektor

UMKM telah mencapai 60,34%. Sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, di mana serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22%.

Pada krisis tahun 2008, sektor UMKM mampu menjadi salah satu benteng perekonomian rakyat sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk (Kara: 2013, 3). UMKM bergerak pada sektor riil dan persentase usaha mikro di Indonesia sangatlah besar, hal ini menyebabkan sektor usaha dalam negeri tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak yang ditimbulkan oleh perlemahan nilai tukar rupiah. UMKM juga mampu bertahan pada krisis di mana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan (Manurung, 2008:2). Sedangkan menurut Pratomo dan Soejodono (2002:14) alasan UMKM dapat bertahan dari krisis karena sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis menyebabkan keterpurukan sektor perbankan dan kenaikan suku bunga bank tidak berpengaruh terhadap UMKM. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan akan menyebabkan sektor formal memberhentikan tenaga kerjanya. Sehingga para penganggur akan memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, dan berdampak pada jumlah UMKM meningkat. Selain itu jika UMKM berkembang dan menjadi semakin besar tentu dapat juga memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai devisa negara dengan cara melakukan aktivitas ekspor-impor barang sehingga semakin memberikan dampak positif untuk perekonomian negara. Berikut adalah Tabel 1.1 mengenai jumlah UMKM beserta Usaha Besar (UB) yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1: Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar Tahun 2012-2013

No.	Indikator	Tahun 2012		Tahun 2013		Perkembangan 2012-2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Usaha Mikro	55.856.174	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
2	Usaha Kecil	629.418	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
3	Usaha Menengah	48.997	0,09	52.106	0,09	3.11	6,35
4	Usaha Besar	4.968	0,01	5.066	0,01	90	1,97
Total		56.539.557	100	57.900.787	100	1.358.421	-

Sumber: Kemenkop dan UMKM, 2013

Dapat dilihat dari data pada Tabel 1.1 di atas, bahwa jumlah usaha mikro sebesar 55.856.176 unit atau sebesar 98,79%. Jumlahnya jauh berbeda dengan usaha kecil yaitu sebesar 629.418 unit atau 1,11%. Usaha menengah dengan jumlah 48.997 unit atau hanya 0,09% dari total pangsa UMKM yang ada di Indonesia. Jumlah Usaha Besar yang berada di Indonesia jumlahnya semakin kecil, yaitu sebesar 4.968 unit atau hanya sebesar 0,01% dari porsi seluruh jenis usaha yang berada di Indonesia.

Jawa Timur, merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia. Dengan besarnya Jawa Timur tentunya tidak luput dari permasalahan yang ada di dalamnya. Persentase penduduk miskin yang berada di Jawa Timur menurut data BPS Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 12,73% dan memiliki tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebesar 4,3%. Dengan tingginya jumlah rumah tangga miskin serta tingkat pengangguran terbuka yang dimiliki oleh Jawa Timur, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu membentuk suatu

kebijakan guna dapat menyerap tenaga kerja serta mengurangi tingkat kemiskinan yang berada di Jawa Timur. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2013), Jawa Timur memiliki UMKM sebanyak 6.825.931 unit, dan berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 11.117.439 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh pemerintah guna mendapatkan banyak sekali manfaat di mana salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang besar.

Faktanya, UMKM dimulai dan dikelola oleh lapisan terkecil dari suatu masyarakat. Masyarakat lapisan terkecil juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian negara. UMKM juga berperan dalam mengurangi pengangguran di daerah karena UMKM tersebar diberbagai daerah mulai dari kota besar sampai dengan daerah tertinggal. UMKM juga dapat mengentaskan kemiskinan karena merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Dikarenakan UMKM dikelola mulai dari lapisan masyarakat terkecil menyebabkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Berikut merupakan Tabel 1.2 mengenai perkembangan UMKM:

Tabel 1.2: Tabel Perkembangan UMKM Tahun 2011-2013

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	55.206.444	56.534.592	57.895.721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,57	2,41	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	101.722.458	107.657.509	114.144.082
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	2,33	5,83	6,03

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1.369.326	1.451.460	1.536.918
6	Pertumbuhan Sumbangan PDB UMKM	Persen	6,76	6,00	5,89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	187.441	166.626	182.112
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	6,56	-11,10	9,29

Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah UMKM setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya hampir mencapai 2,50%. Terbukti bahwa UMKM juga dapat mengurangi tingkat pengangguran, di mana sampai dengan tahun 2013 sebanyak 114.114.082 orang bekerja dan terserap di sektor-sektor yang tergolong sebagai UMKM. Selain itu sumbangan UMKM sangat besar, yaitu sebesar Rp. 1.536.918.80 Miliar atau sebesar 60,34% dari total PDB serta mempunyai nilai ekspor sebesar Rp. 182.112.70 Miliar. Meskipun di awal disebutkan UMKM merupakan sektor yang cenderung hanya dimiliki perorangan atau kelompok saja, dengan jumlah UMKM yang banyak maka tentunya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, perputaran uang, sumbangan terhadap PDB, dan tentunya nilai ekspor negara yang terus membaik (Prasetyo, 2008:9). Dengan adanya hal tersebut, akan membuat Indonesia semakin kuat pada saat terjadi krisis ekonomi terutama yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah, karena kebanyakan usaha mikro masih belum melakukan kegiatan ekspor-impor sehingga dampak gejala tersebut tidak terlalu berdampak di Indonesia. Maka dari itu, UMKM adalah sektor yang harus

dijaga dan terus dikembangkan oleh pemerintah karena memiliki manfaat yang cukup banyak bagi perekonomian.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena sebagian besar UMKM adalah usaha mikro, tentunya usaha mikro adalah sebuah unit usaha kecil yang sangat rentan terhadap masalah. Masalah-masalah yang umum dimiliki oleh UMKM yaitu masalah modal seperti tidak punya akses terhadap pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan UMKM yang rendah, kurangnya inovasi produk, dan keterbatasan dalam mengakses pasar sehingga peluang usaha cenderung kecil. Maka dari itu, peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh UMKM sangat diperlukan, saat ini pemerintah memiliki dan menawarkan banyak program yang sudah diterapkan seperti adanya Balai Latihan Kerja (BLK) di mana hal tersebut adalah upaya dalam meningkatkan *skill* agar sumber daya manusia dapat meningkat.

Dalam pengembangan UMKM, peran yang cukup penting dalam mengembangkan usaha adalah permodalan dan hal ini menjadi masalah yang paling banyak dihadapi oleh pelaku usaha UMKM. Masalah modal memang merupakan salah satu masalah UMKM sejak lama, maka dari itu pemerintah dan banyak lembaga lainnya juga memberikan produk layanan terkait pembiayaan. Banyak produk pinjaman yang berskala nasional oleh pemerintah seperti KUR, Kredit Ultra Mikro, selain itu juga terdapat pembiayaan lainnya seperti dari Bank BRI yaitu BRIGuna. Setiap produk pembiayaan tentunya memiliki tingkat bunga yang berbeda-beda, termasuk dengan bagaimana cara memperoleh dan prioritas dari program tersebut.

Salah satu masalah utama yang sering dialami oleh pelaku UMKM terkait dengan modal ialah keterbatasan akses permodalan (Kara, 2013:4). Jika masyarakat meminjam uang di bank terdapat sistem perbankan di mana bahwa usaha yang dimiliki oleh calon debitur harus *feasible* (layak) dan debitur juga harus *bankable*. Faktanya dilapangan masih banyak pelaku usaha (terutama yang berada di level *startup*) yang sudah *feasible* namun tidak *bankable*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memetakan dan memfokuskan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada pertumbuhan inklusif. Makna dari inklusif ini ialah sebuah konsep yang menyeluruh di mana konsep dari pertumbuhan inklusif bermula dari adanya pemikiran yang melihat *equity* atau kesetaraan merupakan jalan bebas hambatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seharusnya diwujudkan dengan pembangunan yang setara disetiap level masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan termasuk juga mengurangi kemiskinan. Konsep pertumbuhan yang bersifat inklusif itu ada tiga hal, yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi itu sendiri, kemudian adanya kesetaraan dalam konteks pembangunan, dan yang ketiga ialah pengurangan kemiskinan. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfokuskan kebijakannya supaya dapat mensejahterakan rakyat miskin supaya terjadi kesetaraan antar masyarakat dan dapat membangun Jawa Timur yang lebih baik lagi. Menurut Soekarwo (2016:172), UMKM kuat karena basis bahan baku sebagian terbesar adalah dari bahan baku lokal yang relatif tahan terhadap tekanan mata uang. Kontribusi UMKM Jawa Timur yang mencapai 54,98%, merupakan kinerja yang cukup signifikan, dapat diartikan pula bahwa segmen UMKM ini menjadi penopang utama ekonomi Jawa Timur.

Peran Pemerintah Provinsi tidak saja sebagai penyedia barang dan jasa publik, namun lebih dari itu berfungsi dalam membangun desain kerja dengan kebijakan fiskalnya. Dengan adanya desain kerja serta kebijakan fiskal yang baik, akan menghasilkan inovasi-inovasi di masing-masing aktivitas ekonomi, di samping itu strategi ini dimaksudkan pula untuk memperkuat peran Jawa Timur dalam membangun kebangkitan sistem produksi nasional yang memiliki daya saing dan ketersediaan produksi yang ajeg. Dengan sistem produksi nasional yang baik, maka proses-proses ekonomi akan terjamin pula pasokan produksinya dan dapat mengurangi impor bahan baku, karena terdapat konektivitas sistem produksi secara nasional.

Peningkatan produksi UMKM di Jawa Timur selama ini terbukti dapat menunjang pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan kerja. Kinerja pertumbuhan PDRB Jawa Timur sejak tahun 2009 selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional. Salah satu segmen pelaku yang memiliki peran penting dalam capaian PDRB tersebut adalah UMKM, di mana pada tahun 2014 sumbangan UMKM terhadap PDRB mencapai 54,98%.

Jenis pembiayaan UMKM yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari instansi penyedia layanannya, tingkat suku bunga, maupun target dari program yang telah dibuat. Dengan banyaknya pembiayaan UMKM, UMKM akan cenderung memilih pembiayaan yang paling menguntungkan dibandingkan jenis pembiayaan kredit lainnya. Dikarenakan modal merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, terkadang UMKM tidak hanya melakukan pinjaman disatu lembaga saja. Maka dari itu, penelitian ini akan lebih memfokuskan terkait pengaruh modal dalam bentuk pembiayaan kredit terhadap perubahan produksi, tenaga kerja, maupun

pendapatan UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program pembiayaan UMKM bernama dana bergulir, dana bergulir ini akan dijadikan sebagai salah satu contoh jenis pembiayaan yang tentunya dapat meningkatkan modal usaha dari suatu UMKM.

Dana bergulir merupakan salah satu program yang merupakan solusi terhadap permasalahan permodalan yang ada di para pelaku UMKM. Dana bergulir merupakan program yang dananya bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana bergulir merupakan suatu bentuk pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dipergunakan masyarakat Jawa Timur di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur sebagai modal kerja maupun investasi untuk usahanya. Dana bergulir tidak hanya digunakan untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM saja, koperasi juga dapat mengakses pinjaman di pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui adanya program dana bergulir ini. Dana bergulir juga dapat digunakan oleh petani dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, pembelian gabah/beras maupun bahan pangan lainnya termasuk pengembangan lumbung pangan, pengembangan cadangan pangan di pekarangan, kelembagaan pangan, sistem tunda jual, dan teknologi pangan untuk pangan olahan, penyaluran pupuk pada petani serta bibit dan teknologi peternakan.

Dana bergulir sudah dimulai sejak tahun 2001 yang berarti bahwa program ini sudah berlangsung cukup lama. Sejak awal mula dana bergulir sampai sekarang, terdapat beberapa perubahan sehingga dana bergulir dapat terus mempertahankan konsistensinya sampai saat ini. Peraturan gubernur terkait dana bergulir telah berubah sebanyak 6 kali, program dana bergulir telah mengalami berbagai macam perubahan dan tentunya setiap perubahan-perubahan yang terjadi tentunya memiliki

penambahan dan/atau perubahan sistem yang diperbarui supaya penyerapan dana bergulir lebih baik setiap tahunnya. Salah satu bentuk revolusi dana bergulir ialah dengan dikembangkannya Sistem Informasi Pembiayaan Dagulir (SIPDe) atau dengan kata lain merupakan *e-Financing* yang tujuan dari adanya SIPDe ini adalah mengikuti perkembangan teknologi zaman karena memudahkan calon debitur untuk mengakses dana bergulir. Berikut ini merupakan Tabel 1.3 terkait dengan jumlah debitur pada bulan Desember tahun 2017:



Tabel 1.3: Jumlah Debitur Dana Bergulir Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Cabang	Plafond	Jumlah Nasabah
1	Surabaya	33.214.000.000	165
2	Pamekasan	6.127.000.000	59
3	Bangkalan	9.740.000.000	72
4	Banyuwangi	9.055.000.000	58
5	Lumajang	7.975.000.000	65
6	Probolinggo	17.320.000.000	112
7	Pasuruan	8.775.000.000	84
8	Malang	5.605.000.000	38
9	Ngawi	38.380.000.000	221
10	Blitar	13.165.000.000	92
11	Kediri	5.195.000.000	45
12	Mojokerto	8.385.000.000	86
13	Jombang	12.805.000.000	94
14	Nganjuk	8.155.000.000	81
15	Madiun	9.734.000.000	69
16	Tulungagung	14.540.000.000	151
17	Trenggalek	6.590.000.000	79
18	Ponorogo	39.815.000.000	387
19	Gresik	26.315.000.000	160
20	Lamongan	33.980.000.000	262
21	Magetan	11.280.000.000	63
22	Pacitan	19.105.000.000	157
23	Sidoarjo	30.095.000.000	201
24	Jember	10.090.000.000	120
25	Tuban	6.580.000.000	43
26	Batu	1.875.000.000	11
27	Situbondo	750.000.000	8
28	Bojonegoro	12.025.000.000	107
29	Bondowoso	625.000.000	6
30	Sumenep	2.445.000.000	24
31	Kepanjen	425.000.000	4
32	Sampang	7.098.000.000	33
Total		417.263.000.000	3.157

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, 2017

Posisi bulan Desember tahun 2017 jumlah debitur dana bergulir yang masih aktif berjumlah 3.175 nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi serta minat masyarakat terhadap program pembiayaan dana bergulir cukup besar. Pelaku usaha tertarik dengan dana bergulir ini dikarenakan bunga yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur jumlahnya tidak besar, dan dalam sistem dana bergulir ini juga dapat mengakomodir masyarakat Jawa Timur yang belum memenuhi persyaratan perbankan untuk melakukan pinjaman. Kredit dana bergulir pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem *chanelling*. *Channeling Agent* adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/pembiayaan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian atas pemberian pinjaman/pembiayaan bekerjasama dengan Balai Lelang / Kantos Perbendaharaan Kas Negara. Dalam hal ini pemerintah menggandeng dua bank pemerintah untuk menyalurkan dana bergulir ke masyarakat Jawa Timur, yaitu melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Penelitian ini akan mengambil studi kasus di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kota/Kabupaten dengan jumlah debitur terbanyak, yaitu berada di posisi ke-4 dengan jumlah sebesar 201 debitur, dan menempati peringkat ke-5 dengan jumlah plafond kredit sebesar Rp. 30.095.000.000,00. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Prastastiany (2015:17), salah satu masalah dari 3 masalah yang ada di UMKM Kabupaten Sidoarjo adalah adanya keterbatasan modal. Keterbatasan modal itu juga disebabkan oleh rendahnya akses industri kecil pada lembaga keuangan formal. Selain itu, penelitian ini akan fokus meneliti UMKM yang bergerak di sektor industri pengolahan, berikut

adalah Tabel 1.4 terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh bank umum dan BPR berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1.4: **Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo (Posisi Desember 2017)**

No.	Sektor	Pinjaman (dalam juta rupiah)
1	Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan Perikanan	260.807
2	Pertambangan dan Penggalian	258.914
3	Industri Pengolahan	16.312.621
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	83.337
5	Konstruksi	2.094.891
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6.976.476
7	Pengangkutan dan Komunikasi	467.006
8	Keuangan, <i>Real Estate</i> , dan Jasa Perusahaan	1.370.403
9	Jasa-jasa	920.355
	Total	28.744.810

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Wilayah IV (Jawa Timur)

Dapat dilihat dari Tabel 1.4 di atas bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

UMKM yang bergerak di sektor industri pengolahan tentunya tak luput dari proses produksi. Proses produksi merupakan suatu kegiatan utama yang dilakukan suatu usaha dalam menjalankan usahanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indah Yuliana Putri (2010:9) di Kabupaten Jepara, setelah adanya bantuan kredit terhadap UMKM, mengakibatkan modal bertambah dan kemampuan usaha mikro dalam memproduksi juga ikut meningkat. Selain itu, dalam melakukan produksinya,

tentunya UMKM memerlukan tenaga kerja dalam proses usahanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianita Anisyah (2011:24), di Semarang setelah UMKM menerima pinjaman kredit yang sebelumnya UMKM memiliki 2 tenaga kerja, setelah menerima bantuan pinjaman tenaga kerja rata-rata meningkat menjadi 3 per UMKM. Ketika UMKM telah selesai melakukan proses produksi dan telah menghasilkan *output*, maka tentunya hasil produksi tersebut dipasarkan untuk dijual kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Indah Yuliana Putri (2010:10), setelah UMKM mendapat pinjaman terjadi peningkatan keuntungan dari rata-rata sebesar Rp. 532.500 menjadi Rp. 1.532.000. Berdasarkan beberapa temuan tersebut, penelitian ini akan melihat pengaruh pembiayaan UMKM antara sebelum mendapatkan pinjaman, dan setelah mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan variabel seperti perubahan pada tenaga kerja UMKM, produksi UMKM, serta pendapatan UMKM setelah menerima pembiayaan. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul penelitian **“Analisis Dampak Modal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan (Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana pengaruh dana bergulir terhadap jumlah produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan UMKM setelah mendapatkan pinjaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna menjawab permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

dampak dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap peningkatan produksi, jumlah tenaga kerja, dan pendapatan UMKM setelah mendapatkan pinjaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi pihak yang terkait, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan maupun penelitian selanjutnya terkait pengaruh dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap UMKM sektor industri pengolahan, maupun pinjaman secara umum oleh lembaga peminjaman lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pemangku kebijakan, agar dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terus bertahan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Timur guna mengatasi masalah yang ada.

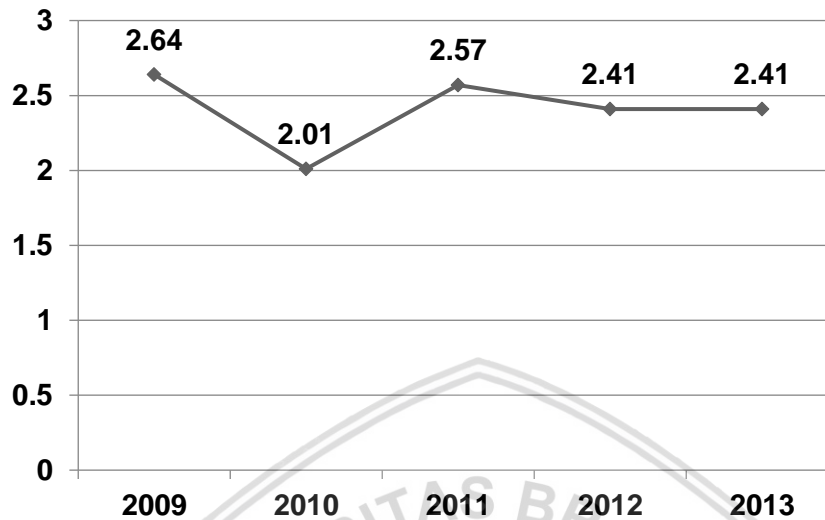
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu objek yang dianggap efektif dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memberikan perhatian kepada sektor UMKM supaya sektor UMKM ini dapat tetap dapat eksis ditengah-tengah persaingan usaha dengan perusahaan besar. Perkembangan UMKM di Indonesia semakin meningkat dikarenakan UMKM bergerak disegala lapisan masyarakat baik masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dapat membentuk usaha dengan skala yang ditetapkan pada skala UMKM. Hal ini terlihat dari perkembangan pertumbuhan PDRB Indonesia yang semakin tinggi yang disumbang oleh berbagai macam industri yang paling banyak berada di level mikro, kecil dan menengah.

Sektor UMKM menjadi peranan penting dalam membangun perekonomian nasional di mana banyak tenaga kerja yang terserap dan PDRB meningkat setiap tahunnya. Data pertumbuhan UMKM yang disediakan oleh BPS hanya menunjukkan data perkembangan UMKM sampai tahun 2013. Namun, setiap tahunnya selalu menggambarkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini juga diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah kemauan atau kesanggupan masyarakat untuk menjadi wirausaha di semua sektor perekonomian yang ada. Berikut adalah Gambar 2.1 berkaitan dengan pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia:

Gambar 2.1: **Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia (Persen)**

Sumber: BPS, 2016 (data diolah)

Dari data pada Gambar 2.1 di atas, dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan UMKM pada tahun 2010, kemudian peningkatan pertumbuhan kembali terjadi di tahun 2011. Peningkatan tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengusung kebijakan pemberdayaan untuk optimalisasi koperasi dan UMKM yang terkait dengan rencana pembangunan jangka Panjang. Dengan begitu, peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha kondusif bagi UMKM. Harapannya UMKM dapat mengembangkan produk serta pemasaran bagi UMKM, peningkatan daya saing dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki, serta dalam kebijakan tersebut diharapkan adanya penguatan kelembagaan koperasi.

Peran UMKM terhadap PDB sangatlah tinggi. Data BPS mencatatkan bahwa sumbangan UMKM berdasarkan harga konstan terhadap PDB di tahun 2013 sebesar Rp. 1.536.918,80 Miliar. PDB yang tinggi ini membuat pemerintah ingin terus menjaga dan

mengembangkan sektor UMKM karena manfaatnya sangat baik bagi masyarakat maupun sumbangsuhnya terhadap perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah merupakan suatu singkatan yang berasal dari beberapa golongan. UMKM tersebut digolongkan oleh jumlah aset serta omset dari usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha. Penggolongan tersebut sudah di atur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendefinisikan ketiga jenis usaha (Mikro, Kecil, dan Menengah) tersebut secara terpisah, dan hal tersebut dapat dilihat melalui Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1: **Kriteria UMKM Menurut UU no. 20 Tahun 2008**

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan Bersih	Kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Hasil Penjualan	Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

UMKM juga merupakan suatu bentuk usaha yang tidak hanya baik dalam perekonomian negara, namun dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada didalam negeri. Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 5 berbunyi meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Peran UMKM memang sangat penting bagi Indonesia karena merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Menurut Nunik Afiah (dalam Widyaresti, 2012:3), usaha mikro dan kecil menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian masyarakat menengah ke bawah dalam meningkatkan kesejahteraannya. Peran UMKM yang sangat terkenal adalah perannya dalam mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS tahun 2013, UMKM telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 114.444.082 orang. Pertumbuhan UMKM semakin tahun yang semakin meningkat, hal tersebut juga merupakan sarana yang dapat mengeliminasi masalah keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, karena UMKM dapat dikatakan sebuah sarana bagi pengangguran dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dan keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh UMKM tidak terlalu rumit, seorang individu yang memiliki keahlian, serta pendidikan (Sumber Daya Manusia) yang rendah pun juga dapat mendapatkan lowongan pekerjaan di sektor ini.

Terkait dengan pengambilan kebijakan baik pemerintah pusat sampai ketingkat daerah, pengambilan suatu kebijakan yang diambil dari permasalahan yang ada. UMKM

juga tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang ada, umumnya masalah UMKM itu ada empat, yaitu:

1. Modal

Masalah permodalan bagi UMKM merupakan masalah mendasar dan sangat penting untuk diselesaikan. Masalah modal merupakan masalah yang cukup pelik untuk diselesaikan, meskipun pada saat ini sudah banyak jenis pembiayaan modal (baik itu terkait modal usaha maupun modal investasi). Sayangnya jenis pembiayaan tersebut hanya dapat diakses bagi individu (maupun kelompok) yang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni. Sedangkan bagi masyarakat menengah kebawah yang cenderung tidak memiliki apa-apa dan hanya mempunyai agunan yang nilainya cukup rendah, tidak dapat mengakses jenis pembiayaan modal tersebut. Berikut disajikan pada Tabel 2.2 tentang sumber permodalan usaha mikro dan kecil:

Tabel 2.2: **Sumber Permodalan Usaha Mikro dan Kecil**

No.	Keterangan	Kecil	Mikro
1	Modal Sendiri	59,88%	83,30%
2	Informal	14,55%	10,19%
3	Formal	25,58%	6,51%

Sumber: BPS, 2014

Menurut data pada Tabel 2.2 di atas, sebagian besar usaha mikro dan kecil masih mengandalkan sumber permodalan sendiri dibandingkan dari pembiayaan formal dan informal. Usaha mikro adalah usaha yang paling banyak menggunakan

modal sendiri, sebesar 83,30% usaha mikro masih menggunakan modal sendiri ketimbang menggunakan sektor keuangan formal, maupun dengan informal. Selain hal itu, dari data yang diperoleh, alasan industri mikro tidak/belum pernah meminjam dari bank sebanyak 61% mengatakan tidak berminat, kemudian 14% mengatakan tidak memiliki agunan yang dapat dijaminkan, disusul oleh 10% yang mengaku tidak mengetahui prosedur meminjam dari bank, kemudian terdapat 8% yang merasa suku bunga pinjaman di bank terlalu tinggi, disusul oleh 6% responden merasa prosedurnya rumit, dan terdapat 1% yang sudah sempat meminjam tetapi usulannya ditolak.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Salah satu kelebihan dari adanya UMKM adalah penyerapan tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan maupun kualifikasi khusus, namun hal tersebut juga merupakan masalah dalam pengembangan UMKM. Rendahnya kualitas sumber daya manusia membuat UMKM sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dan kreatifitas suatu individu yang menyebabkan kurang maksimalnya inovasi produk barang maupun jasa.

3. Pemasaran dan kemasan yang kurang menarik

Masalah lainnya yaitu kualitas kemasan dari UMKM yang masih kalah dibandingkan dengan usaha besar, hal tersebut menyebabkan konsumen lebih tertarik untuk memilih barang-barang yang terlihat *eye catching*. Masalah terkait kemasan yang kurang menarik, biasanya dipengaruhi oleh kurangnya ide dan inovasi terkait barang yang dihasilkan, serta kurangnya teknologi yang canggih untuk memproduksi jenis kemasan yang menarik bagi konsumen di pasar.

4. Informasi tidak sempurna dan akses terhadap pasar

Adanya informasi yang tidak sempurna dan kesulitan akses untuk masuk ke dalam pasar merupakan masalah lainnya. Hal ini juga dikarenakan oleh kurangnya persaingan barang atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM, selain hal tersebut dikarenakan adanya pemain besar lain yang sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia tersebut, sehingga masyarakat juga lebih tertarik untuk membeli produk dari usaha yang sudah memiliki label tersebut.

Menurut Surdayanto, dkk (2013:2) pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini sangat diperlukan supaya UMKM mendapatkan nilai jual di pasar domestik atau bahkan di pasar internasional. Dengan adanya solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan UMKM dapat tumbuh semakin pesat dan barang maupun jasa yang ditawarkan dapat segera bersaing di pasar guna meningkatkan daya saing serta penguatan dan pengembangan dari UMKM itu sendiri.

2.2 JATIMNOMICS dan Pembiayaan UMKM; Solusi Permasalahan Modal

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57.895.721 unit. Dengan banyaknya UMKM yang ada di Indonesia, terdapat masalah modal yang biasanya merupakan masalah utama sebagian besar UMKM. Namun pemerintah dan lembaga lain memberikan solusi hal tersebut melalui pembiayaan terhadap

UMKM. Sebagaimana Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek pembiayaan UMKM di atur:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil;
2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dan penysihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
3. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya
4. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pembiayaan UMKM merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah maupun lembaga lainnya dalam mengatasi permasalahan modal bagi UMKM, karena suatu usaha tidak akan mencapai keberhasilan yang optimal apabila tidak didukung oleh struktur permodalan yang kuat. Dengan adanya pembiayaan melalui lembaga keuangan, UMKM diharapkan masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mendirikan usahanya, maupun

mengembangkan usahanya. Menurut Siamat (2005:38) lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil. Di mana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.

Lembaga keuangan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Lembaga Keuangan Formal dan Lembaga Keuangan Informal sehingga sumber pembiayaan UMKM ini bermacam-macam ada yang berasal dari pemerintahan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), lembaga perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Kredit Desa (BKD) maupun non-bank seperti koperasi simpan pinjam, lembaga dana kredit perdesaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Pembiayaan UMKM yang ditawarkan oleh setiap instansi tentunya berbeda-beda, mulai dari jenis programnya, target programnya, bagaimana alur peminjamannya, serta tingkat bunganya. Hal ini merupakan hal yang baik untuk masyarakat, karena dengan banyaknya jenis pinjaman yang tersedia, masyarakat bebas untuk mengakses jenis pembiayaan apa yang paling cocok untuk diakses oleh masyarakat tersebut. Menurut Prasastiany (2015:13), salah satu faktor yang menyebabkan individu ingin mengajukan suatu jenis pembiayaan dikarenakan ketentuan agunan dan bunga (rendah) sehingga tidak memberatkan debitur.

Mayoritas jenis pinjaman kredit berasal dari bank umum dibandingkan dengan lembaga pembiayaan non perbankan, persaingan antar lembaga pembiayaan menjadikan lembaga pembiayaan non bank menjadi kurang populer. Kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses kredit di perbankan umumnya ialah syarat yang diberikan

oleh bank kepada calon debitur dianggap berat oleh calon debitur, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dalam memberikan kredit, pihak bank akan memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Pertama, debitur harus memiliki usaha yang *feasible*. Kedua, calon debitur juga harus *bankable*. Arti dari *feasible* disini ialah layak, yang dimaksud dengan layak disini ialah suatu usaha harus tidak bertentangan dengan hukum, kemudian secara teknis usaha tersebut dapat dijalankan dengan baik, kemudian terdapat pasar (permintaan) akan barang maupun jasa yang ditawarkan, kemudian usaha tersebut harus memberikan nilai manfaat bagi konsumen, dan yang terakhir usaha tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk aspek *feasible* ini biasanya bank melakukan terjun lapang guna melihat langsung usaha yang sedang dijalani oleh calon debitur untuk menilai apakah usaha tersebut layak atau tidak. Sedangkan makna dari *bankable* ialah bahwa suatu usaha dapat dikatakan *bankable*. Menurut Firdaus dan Ariyanti (dalam Widayanthi, 2012:11) debitur dikatakan *bankable* jika memenuhi asas 5C, yaitu:

1. *Character* (moral)

Seperti itikad baik dari pengusaha untuk membayar kredit yang biasanya dapat dilihat melalui *tracking* SID calon debitur.

2. *Collateral* (agunan)

Bahwa agunan yang dijaminakan dalam kredit tersebut nilainya mencukupi sebagai jaminan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di lembaga peminjaman kredit.

3. *Capital* (modal sendiri)

Pengertian capital atau modal sendiri disini ialah semangat bekerja dari calon debitur tersebut.

4. *Capacity* (kemampuan membayar)

Hal ini biasanya dilihat perbankan dari segi penghasilan perbulan si calon debitur dan pengeluaran wajib bulanan lainnya, sehingga bank dapat memperkirakan resiko dari calon debitur tersebut.

5. *Condition* (produktivitas)

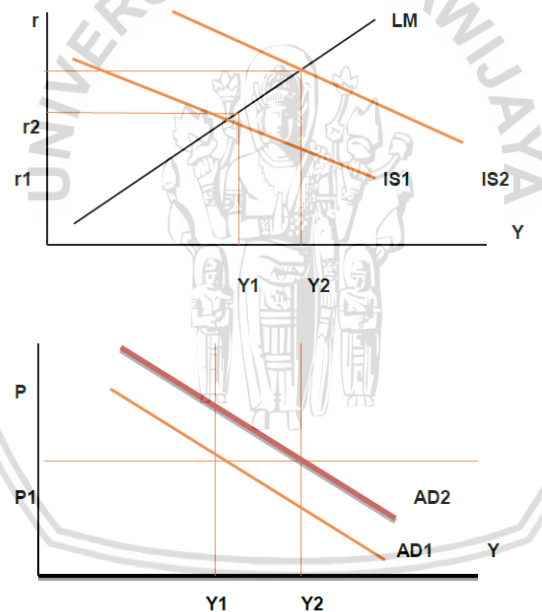
Bank akan melihat apakah kondisi UMKM (produktivitas) dari debitur tersebut dalam keadaan baik.

Bagi UMKM yang telah melakukan pinjaman kredit dari perbankan maupun non perbankan ini diharapkan akan terjadinya dampak positif bagi UMKM, seperti perluasan usaha, yang dapat dilihat dari peningkatan tenaga kerja, peningkatan skala produksi, maupun peningkatan pendapatan bagi pengusaha tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja perekonomian, peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebagai penyedia barang jasa dan publik. Tetapi juga membuat dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang mampu menghasilkan suatu inovasi di masing-masing aktivitas ekonomi utama. Sehingga dapat menghasilkan output yang kompetitif baik itu di pasar domestik maupun di pasar internasional serta mampu menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif. Sesuai dengan teori Keynes, di mana Keynes mengatakan perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi guna memperbaiki keadaan ekonomi yang lesu, di mana inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat supaya mendekati posisi "*Full Employment*".

Menurut Keynes, selain dapat meningkatkan output, kebijakan fiskal (secara ekspansif) dapat memberikan efek pengganda terutama pengaruhnya dalam meningkatkan sektor investasi dan konsumsi. Dengan meningkatnya sektor investasi dan konsumsi perekonomian suatu negara akan bangkit dengan adanya pertumbuhan produksi dan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Dibawah ini adalah Gambar 2.2 yang akan menjelaskan bagaimana suatu kebijakan fiskal secara ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan, di mana kondisi tersebut mendorong kurva permintaan agregat bergeser ke kanan sehingga dapat meningkatkan nilai output atau pendapatan.

Gambar 2.2: Kebijakan Fiskal dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Mankiw, 2006

Konsep JATIMNOMICS sesuai dengan teori Keynesian, di mana JATIMNOMICS juga merupakan sebuah model yang mengacu pada pembentukan model Indonesia *Incorporated*. Indonesia *Incorporated* adalah konsep multisinerji seluruh elemen bangsa

dan Negara untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sumber adanya Indonesia *Incorporated* ini bersumber dari Jepang, di mana di Jepang sudah ada bentuk model *Japan Incorporated*, *Japan Incorporated* adalah sebuah istilah yang merujuk pada sinergitas yang ada di antara pemerintah Jepang dengan para pengusaha yang ada disana. Maka dari itu, konsep Indonesia *Incorporated* lebih menekankan bagaimana peran pemerintah, supaya dapat mengembangkan pengusaha, terutama pengusaha kecil yang merupakan fokus dari JATIMNOMICS pada saat ini, yaitu UMKM.

Program pembiayaan UMKM ini tersebar luas di seluruh Indonesia, namun Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Soekarwo, memiliki cara tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki strategi pengembangan UMKM yang terkandung dalam pemikiran JATIMNOMICS. Secara garis besar, JATIMNOMICS memiliki tiga hal besar yang terkait dengan ekonomi kerakyatan, yaitu:

1. Peningkatan produksi yang berdaya saing

Untuk meningkatkan produksi yang berdaya saing Pemerintah Provinsi Jawa Timur memulai hal ini melalui pendataan UMKM di Provinsi Jawa Timur dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Peran pemerintah disini hadir dengan memberikan pelatihan dalam proses desain produk, hal ini guna menarik konsumen supaya tertarik untuk membeli produk sekaligus peningkatan kualitas dari barang yang dihasilkan untuk menghadapi era pasar bebas.

2. Pembiayaan yang kompetitif

Jenis pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki hal yang unik. Bentuk pembiayaan modal yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berbentuk hibah, melainkan berbentuk kredit yang dapat

diakses oleh masyarakat Jawa Timur melalui BUMD Provinsi Jawa Timur seperti Bank Jatim dan Bank UMKM dan melalui skema perbankan. Sistem yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat Jawa Timur adalah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat meskipun masyarakat tersebut tidak memenuhi syarat perbankan (*non bankable*). Hal ini guna memberdayakan masyarakat yang belum memiliki akses permodalan di mana kebanyakan masyarakat yang belum memenuhi kriteria perbankan adalah masyarakat yang termasuk sebagai masyarakat miskin, maka dengan itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan pembiayaan yang kompetitif dengan pembiayaan lainnya, guna memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat miskin.

3. Pemasaran yang efisien

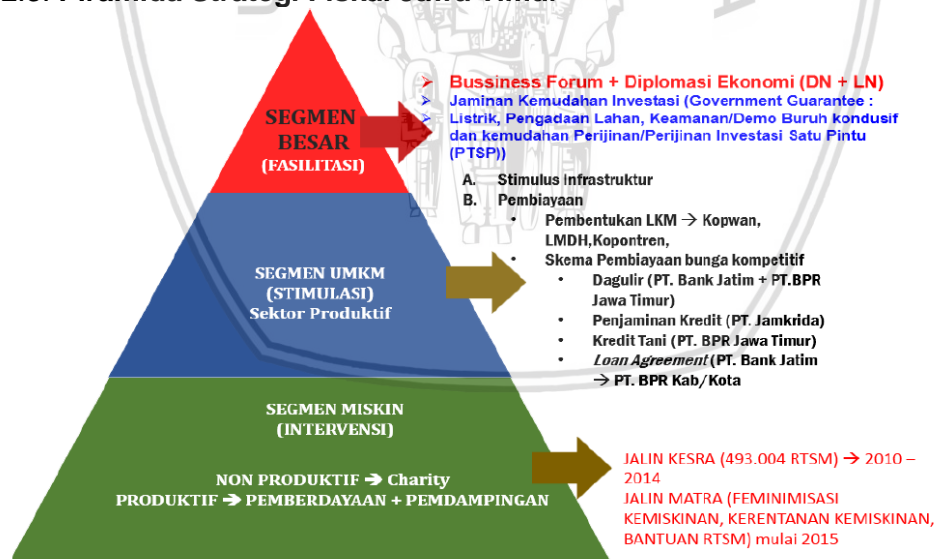
Salah satu kendala UMKM yaitu kendala dalam memasarkan produknya. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kebijakan guna mengoptimalkan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berada di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat suatu sistem pasar yang dapat meningkatkan pangsa pasar domestik dan di tingkat nasional dengan adanya bantuan dari Kantor Perwakilan Dagang (KPD), serta meningkatkan pemasaran di tingkat internasional melalui penempatan penghubung di lima kota di lima Negara. Model pemasaran seperti ini, merupakan model pasar yang dapat meningkatkan pemasaran barang UMKM maupun usaha besar di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Latar belakang adanya pemikiran ini dikarenakan adanya transformasi sektor usaha yang ada di Jawa Timur. Dalam aspek produksi, sektor pertanian Jawa Timur menunjukkan

adanya penurunan sektor tani dan jumlah sektor industri yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan masalah baru didalamnya. Dikarenakan sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang banyak, dan di sektor industri sudah menggunakan teknologi mesin, hal tersebut menyebabkan jumlah tenaga kerja yang terserap semakin sedikit di sektor tersebut. Tentunya dengan adanya hal ini, maka diperlukan strategi khusus dalam menangani permasalahan baik di sektor pertanian, maupun di sektor industri.

Mengingat dalam melakukan pembiayaan melalui APBD memiliki keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi khusus di mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur membagi kekuatan tersebut untuk tiga sasaran utama, tiga sasaran utama tersebut dituangkan kedalam Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3: Piramida Strategi Fiskal Jawa Timur



Sumber: Soekarwo, 2015

Piramida strategi fiskal di atas menjelaskan tentang segmen besar (fasilitasi), segmen umkm (stimulasi), dan segmen miskin (intervensi). Segmen besar ini diberikan kemudahan (fasilitas) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kemudahan investasi, seperti pertemuan bisnis dan diplomasi ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bentuk jaminan yang berikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi pengadaan lahan, listrik, keamanan/demo buruh kondusif serta kemudahan perijinan karena melalui satu pintu. Kemudian segmen kedua yaitu segmen UMKM dengan melakukan stimulasi dengan cara memberikan bantuan kepada sektor produktif seperti UMKM baik itu berupa sarana produksi primer maupun infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah di sektor produktif. Dengan adanya efisiensi dan nilai tambah tersebut, maka akan meningkatkan daya saing UMKM tersebut. Terakhir adalah segmen miskin dengan melakukan mekanisme intervensi. Intervensi disini dikategorikan kedalam dua hal, yang pertama adalah sektor non produktif, dan yang kedua di sektor produktif. Untuk yang berada di sektor non produktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dalam bentuk bantuan (*charity*). Di mana program ini sudah berjalan sejak tahun 2010, sampai dengan tahun 2014 program JALINKESRA sudah menampung 493.004 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kemudian pada tahun 2015 program JALINKESRA digantikan dengan program JALIN MATRA yang mengatasi kemiskinan, kerentanan kemiskinan, serta bantuan terhadap RTSM.

Pemerintah Jawa Timur dengan JATIMNOMICS-nya melalui segmen UMKM dan pembiayaan, memiliki enam langkah guna menstimulasi kinerja UMKM. Pertama *banking system* yang diperbaiki melalui skema APEX Bank, dengan skema ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memposisikan Bank Jatim sebagai APEX ataupun bank sentral untuk BPR di

Jawa Timur. Kedua, skema pinjaman dana bergulir dengan bunga yang ringan yaitu 6%. Ketiga, pembentukan Jamkrida untuk membantu UMKM yang sudah layak untuk diberikan pinjaman, tetapi masih belum *bankable*. Keempat adanya skema kredit khusus di sektor pertanian karena Pemerintah Jawa Timur melihat sektor ini masih rendah aksesnya terhadap perbankan. Kelima, adanya perjanjian antara Bank Jatim dengan BPR terkait penambahan plafon kredit UMKM sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Trilyun). Keenam, pembentukan lembaga keuangan mikro yang berfungsi memberikan ruang gerak sektor mikro pedesaan dan kelurahan seperti pembuatan koperasi.

Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi Masyarakat Jawa Timur yang berada di wilayah Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2016. Menurut Kasmir (2012:51), sumber modal dilihat dari asalnya yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan, sedangkan modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha dan biasanya diperoleh dari pinjaman.

Hal yang melatarbelakangi adanya dana bergulir di Provinsi Jawa Timur memiliki alasan yang sama, yaitu penopang perekonomian Jawa Timur dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur. Di mana fasilitas permodalan UMKM sangatlah dibutuhkan dalam rangka menunjang produksi. Dana bergulir Provinsi Jawa Timur menggunakan skema *channeling* bersama dengan bank mitra yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mitra bank untuk dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan PT.

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, makna skema *chanelling* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui multifinance yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa.

Skema bunga kredit yang diberikan oleh pinjaman dana bergulir menggunakan kredit bunga yang bermacam-macam, tergantung pada besar kecilnya pinjaman serta peruntukan dana bergulir oleh calon debitur tersebut. Jika plafon kredit debitur kurang dari 100 juta, maka bunga yang diberikan sebesar 4% flat per tahun. Namun bila plafon kredit debitur melebihi 100 juta, maka bunga yang diberikan oleh perbankan sebesar 6% flat per tahun. Selain itu, ada juga jenis pembiayaan lainnya yaitu pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus hanya memiliki bunga sebesar 3% flat per tahun. Dana bergulir yang bersifat khusus ini hanya diperbolehkan kepada pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan lainnya termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan, Kelembagaan Pangan, Sistem Tunda Jual dan Teknologi Pangan untuk Pangan Olahan, penyaluran pupuk pada petani serta biit dan teknologi peternakan.

Selain menggandeng PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan PT. Jamkrida Jatim di mana jamkrida ini menjamin masyarakat jawa timur yang memiliki usaha yang sudah *feasible* namun belum *bankable*, dan usaha yang tidak *feasible* dan belum *bankable*. Yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu masyarakat miskin yang belum memiliki agunan atau memiliki resiko gagal bayar yang tinggi. Sehingga harus dilindungi oleh jamkrida, selain itu pengusaha yang berada pada *level startup* juga

dilindungi oleh jamkrida karena memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Dengan adanya sistem dana bergulir yang menggandeng jamkrida sebagai *avalist kredit*, maka dengan ini dana bergulir juga dapat diakses oleh calon debitur yang pada saat meminjam kredit masih belum memenuhi syarat *bankable*.

2.3 Modal, Produksi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Dalam Industri Pengolahan

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya butuh atau tenaga kerja. Industri merupakan suatu bentuk usaha guna mengolah suatu barang mentah menjadi barang setengah jadi, maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menyatakan, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi, dengan kata lain dapat dikatakan adanya nilai tambah suatu barang melalui proses produksi. Menurut BPS, industri pengolahan dapat digolongkan menjadi 24 golongan pokok, yaitu:

- a. Makanan
- b. Minuman
- c. Pengolahan Tembakau
- d. Tekstil
- e. Pakaian Jadi
- f. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki

- g. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
- h. Kertas dan barang dari kertas
- i. Percetakan dan reproduksi media rekaman
- j. Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
- k. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia
- l. Farmasi, produk obat dan obat tradisional
- m. Karet, barang dari karet dan plastik
- n. Barang galian bukan logam
- o. Logam dasar
- p. Barang logam, bukan mesin dan peralatannya
- q. Komputer, barang elektronik
- r. Peralatan listrik
- s. Mesin dan perlengkapan
- t. Kendaraan bermotor
- u. Alat angkut lainnya
- v. Furnitur
- w. Pengolahan lainnya
- x. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Menurut Arsyad (2010:442), industri mempunyai peranan sebagai *leading sector*, maksudnya adalah pembangunan industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat dicontohkan melalui pengembangan sektor pertanian, ketika sektor industri maju, maka sektor pertanian akan terangsang untuk meningkatkan produksinya untuk menopang proses produksi dari suatu industri. Begitupula yang terjadi dengan sektor lembaga keuangan, sektor lembaga keuangan juga akan ikut terangsang untuk menyediakan berbagai macam pilihan terkait pinjaman modal bagi pelaku industri. Menurut teori ekonomi pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor industri terhadap pembangunan ekonomi, maka negara tersebut akan semakin maju. Jika sektor industri

suatu negara di atas 30%, maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju (Sadono, 2006:442).

Suatu industri tidak luput dari proses produksi guna menghasilkan *output* yang diharapkan. Teori yang dapat menggambarkan penelitian ini ialah teori produksi Harrod-Domar. Menurut teori Harrod-Domar dalam Sun'an (2015:26), produksi dipengaruhi oleh modal, di mana dalam teori tersebut terdapat istilah rasio antara modal-*output* atau dapat disebut juga dengan *capital-output ratio* (COR). Dalam COR, Terdapat hubungan ekonomi secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan *output* total (Y). Ketika setiap tambahan terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan *output* total sesuai dengan rasio modal-*output* tersebut.

Persamaan Harrod-Domar dapat ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{k}$$

di mana:

$\frac{\Delta Y}{Y}$ = Tingkat pertumbuhan *output*

S = Rasio tabungan

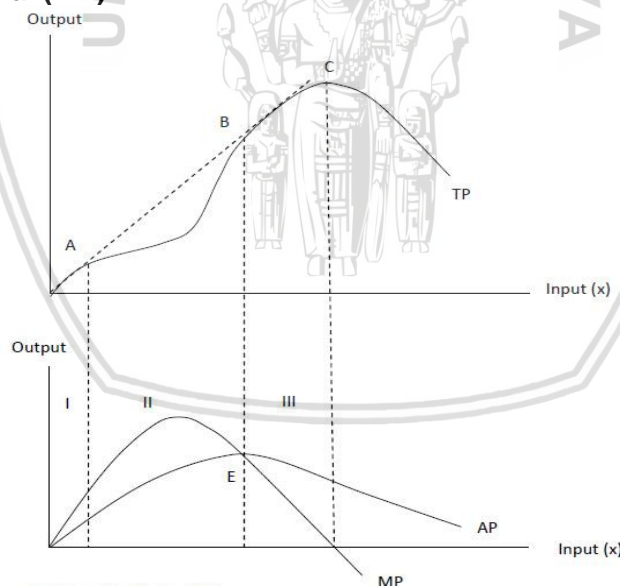
k = Rasio modal-*output*

Secara lebih spesifik, persamaan Harrod-Domar menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan *output* dalam hal ini ialah produksi dalam UMKM, secara positif berhubungan dengan rasio tabungan atau dalam hal ini ialah tambahan modal. Semakin tinggi modal yang diberikan, maka semakin tinggi pula *output* atau produksi yang dihasilkan oleh suatu UMKM. Logika yang dibangun dalam persamaan tersebut ialah, jika UMKM ingin tumbuh. UMKM harus memberikan tambahan modal dan menempatkannya ke sektor produktif seperti

produksi. Dengan itu, semakin banyak modal yang digunakan maka akan semakin cepat pula produksi akan meningkat.

Teori produksi dapat dibagi menjadi dua bila didasarkan menurut waktunya. Pertama ialah dalam jangka pendek, di mana dalam jangka pendek dapat diasumsikan dengan satu faktor saja yang berubah, seperti tenaga kerja. Dalam teori produksi dengan satu faktor ini terdapat hukum yang disebut dengan *The Law of Diminishing Return* (hukum hasil yang semakin berkurang). Dalam hukum ini menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan salah satu variabel produksi seperti, tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan suatu produksi. Berikut adalah Gambar 2.4 yang dapat menjelaskan tentang hukum yang semakin berkurang:

Gambar 2.4: **Kurva Produksi Total (TP), Produksi Rata-Rata (AP), dan Produksi Marjinal (MP)**



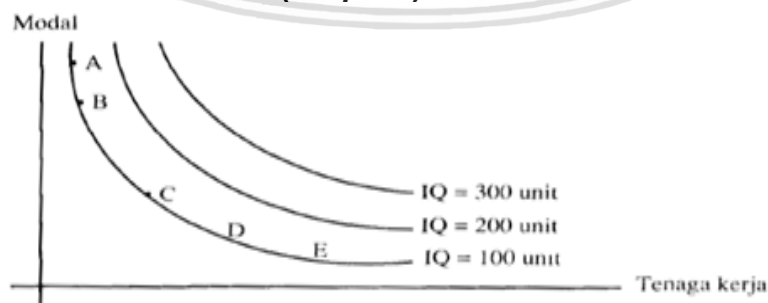
Sumber: Boediono, 1999.

Dalam kurva tersebut menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan *output* produksi. Dalam kurva tersebut terdapat tiga tahap yang digunakan untuk menjelaskan kurva tersebut, yaitu:

1. Tahap awal menunjukkan penggunaan tenaga kerja yang masih sedikit, sehingga ketika ditambah akan menyebabkan total produksi (TP), produksi rata-rata (AP), serta produksi marginal (MP) meningkat, bahkan MP melebihi AP.
2. Tahap kedua menunjukkan ketika jumlah tenaga kerja terus ditambah, maka total produksi (TP) tetap akan meningkat sampai mencapai titik optimum, sedangkan dalam fase tersebut produksi rata-rata (AP) dan produksi marginal (MP) menurun. Ditahap ini juga terjadi persinggungan produksi rata-rata serta produksi marginal.
3. Tahap ketiga menunjukkan keadaan ketika jumlah tenaga kerja terus ditambah, maka akan berdampak pada menurunnya total produksi, produksi rata-rata maupun juga produksi marginal, hingga turun terus menuju angka negatif.

Yang kedua, ialah teori produksi jangka panjang, di teori produksi jangka panjang ini menggunakan dua faktor yang berubah, misalnya modal dan tenaga kerja. Berikut adalah Gambar 2.5 tentang produksi sama:

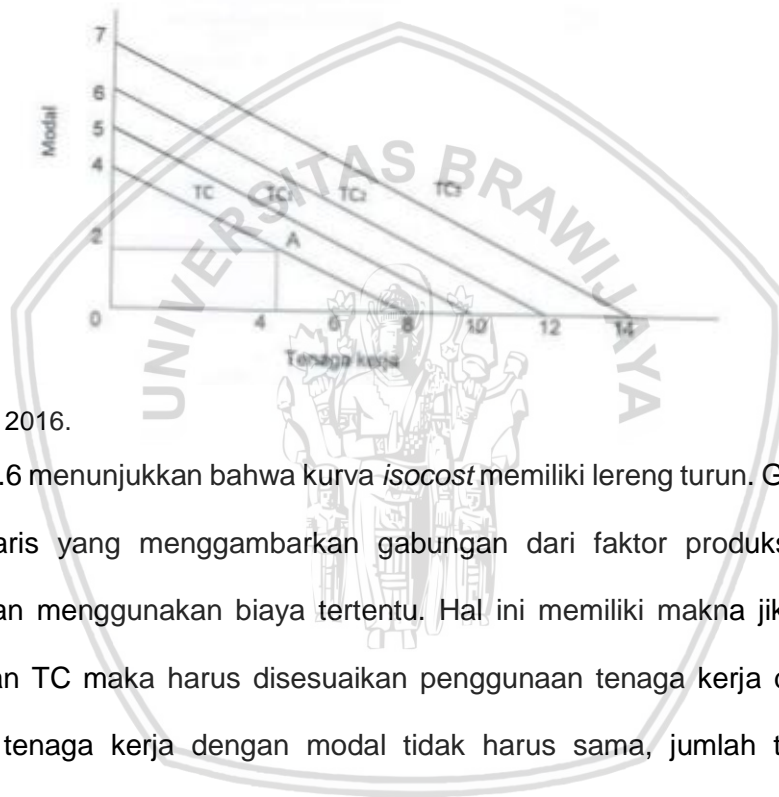
Gambar 2.5: **Kurva Produksi Sama (*Isoquant*)**



Sumber: Sukirno, 2016.

Gambar 2.5 menunjukkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Semakin jauh kurva IQ dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat produksinya. Sedangkan kurva biaya sama (*isocost*), akan menunjukkan kombinasi dari dua input yang dibeli suatu usaha dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Berikut adalah kurva 2.6 tentang biaya sama:

Gambar 2.6: **Kurva Biaya Sama (*Isocost*)**



Sumber: Sukirno, 2016.

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa kurva *isocost* memiliki lereng turun. Garis total biaya (TC) adalah garis yang menggambarkan gabungan dari faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan biaya tertentu. Hal ini memiliki makna jika suatu biaya sejumlah dengan TC maka harus disesuaikan penggunaan tenaga kerja dan modalnya. Jumlah antara tenaga kerja dengan modal tidak harus sama, jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha dengan besarnya total biaya.

Dengan terjadinya peningkatan modal yang meningkatkan produksi suatu UMKM, hal tersebut akan memberikan stimulus kepada pasar *input*. Peningkatan produksi UMKM akan mendorong UMKM untuk memberikan *input* tambahan berupa tenaga kerja. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja sebagai suatu unsur yang mengolah, mengerjakan maupun

mengubah suatu barang mentah/setengah jadi menjadi barang baru yang memiliki nilai tambah. Maka dari itu, dalam proses produksi UMKM membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu *output*. UMKM harus menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang dimiliki oleh UMKM tersebut, hal ini terkait dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang maupun jasa dengan hasil yang maksimal. Dikarenakan tenaga kerja adalah *input* dalam proses produksi, ketika UMKM ingin meningkatkan *output* dengan cara peningkatan modal, hal tersebut juga akan berdampak pada tenaga kerja.

Guna memaksimalkan laba perusahaan melalui produksi, UMKM memerlukan tenaga kerja tambahan dalam memaksimalkan *output* sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut dapat digambarkan melalui produk marginal tenaga kerja (*marginal product of labor / MPL*). Produk marjinal tenaga kerja adalah jumlah *output* tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan, hal ini dengan asumsi modal tetap. MPL dapat menggunakan fungsi produksi:

$$MPL = F(K, L+1) - F(K, L)$$

simbol pertama pada sisi kanan adalah jumlah *output* yang diproduksi dengan unit modal dan tenaga kerja tambahan. Sedangkan simbol kedua adalah jumlah *output* yang diproduksi dengan unit modal dan tenaga kerja. Produk marjinal tenaga kerja ini adalah perbedaan antara jumlah *output* yang diproduksi dengan $L+1$ unit tenaga kerja dan jumlah yang diproduksi dengan produksi yang hanya dengan L unit tenaga kerja.

Gambar 2.4 menjelaskan produk marjinal yang semakin menurun dengan asumsi bahwa modal tetap. Menurut Mankiw (2006:50), produksi marjinal tenaga kerja akan

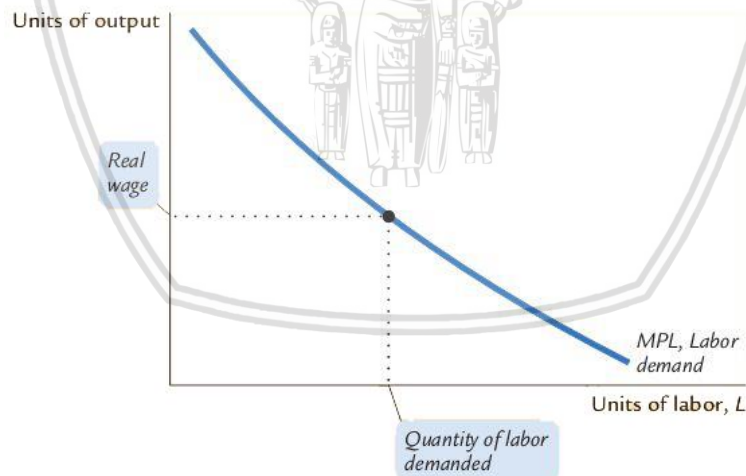
menurun ketika jumlah tenaga kerja ditingkatkan. Namun, untuk menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang harus dipakai guna memaksimalkan *output* ketika modal meningkat, UMKM harus menghitung seberapa besar laba yang dapat dihasilkan ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Hal tersebut dapat digambarkan melalui

$$\Delta \text{Laba} = \Delta \text{Penerimaan} - \Delta \text{Biaya}$$

$$= (P \times MPL) - W$$

dengan persamaan tersebut, UMKM akan menghitung jumlah laba yang didapatkan ketika meningkatkan tenaga kerja. Jika penerimaan tambahan $P \times MPL$ melebihi upah W , unit tenaga kerja tambahan akan meningkatkan laba. Karena itu, UMKM akan meningkatkan tenaga kerja sampai unit berikutnya sudah tidak memberikan tambahan laba lagi. Hal tersebut juga dapat digambarkan melalui Gambar 2.7 berikut:

Gambar 2.7: **Grafik Produk Marjinal Tenaga Kerja**



Sumber: Mankiw, 2006.

Gambar 2.7 menggambarkan bagaimana produk marjinal tenaga kerja bergantung pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Gambar diatas membentuk grafik MPL, karena MPL menurun ketika jumlah tenaga kerja meningkat, kemiringan kurvanya menurun. Untuk setiap upah riil tertentu, UMKM terus menambah tenaga kerja sampai pada titik di mana MPL sama dengan upah riil. Jadi, grafik MPL juga dapat menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja UMKM.

Proses produksi yang meningkat juga akan meningkatkan pendapatan UMKM. Pendapatan UMKM diperoleh dari hasil penjualan *output* nya, yang dihasilkan dari proses produksi. Menurut Boediono (1999: 95), *Total Revenue* (TR) adalah penerimaan total produsen dari semua hasil produksinya, *Total Revenue* ini adalah output dikali dengan harga jual *output*, atau dapat disimbolkan dengan:

$$TR = Q \cdot Pq$$

di mana:

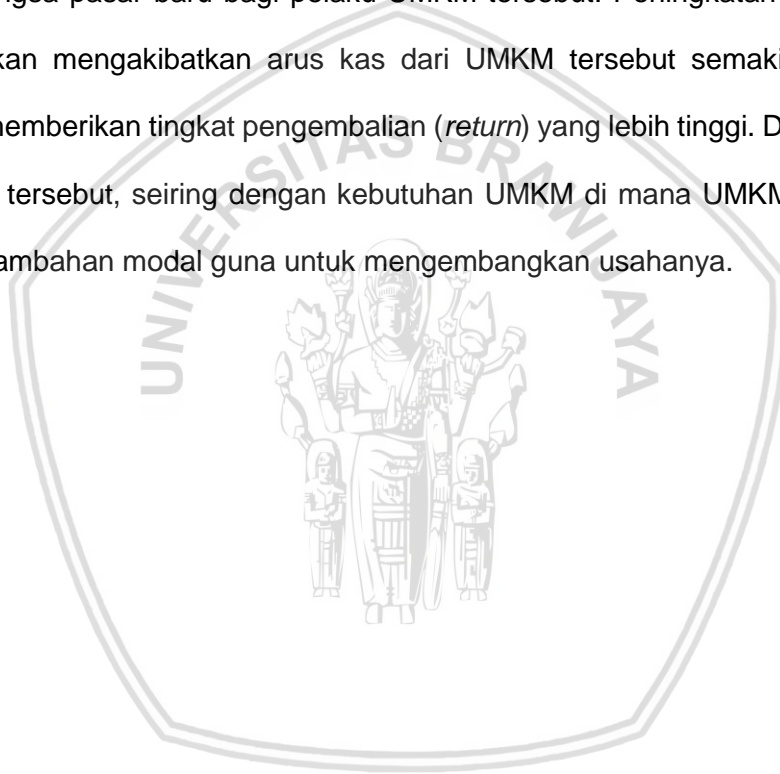
TR = *Total Revenue*

Q = *Quantity*

Pq = *Harga Output*

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat *output* (Q) di mana produsen bisa memperoleh keuntungan total yang maksimum. Jika posisi ini tercapai maka disebut sebagai posisi keseimbangan. Posisi keseimbangan disebut karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah *output* (Boediono, 1993:100). Sebab bila suatu usaha mengurangi (atau menambah) volume *output* nya, maka keuntungan totalnya justru akan menurun.

Menurut Rusanti, dkk (2014) semakin besar pembiayaan kredit maka pendapatan suatu UMKM akan semakin tinggi. Besar kecilnya pembiayaan yang digunakan oleh pelaku UMKM sektor industri pengolahan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatannya. Hal tersebut dikarenakan pinjaman yang diberikan digunakan sebagai modal kerja UMKM guna meningkatkan sektor produksinya, seperti menambah produk baru, melakukan promosi, memperlancar distribusi pemasaran, sehingga dapat memperluas pangsa pasar baru bagi pelaku UMKM tersebut. Peningkatan pangsa pasar bagi UMKM, akan mengakibatkan arus kas dari UMKM tersebut semakin lancar, dan tentunya akan memberikan tingkat pengembalian (*return*) yang lebih tinggi. Dengan adanya tambahan dana tersebut, seiring dengan kebutuhan UMKM di mana UMKM sering sekali membutuhkan tambahan modal guna untuk mengembangkan usahanya.



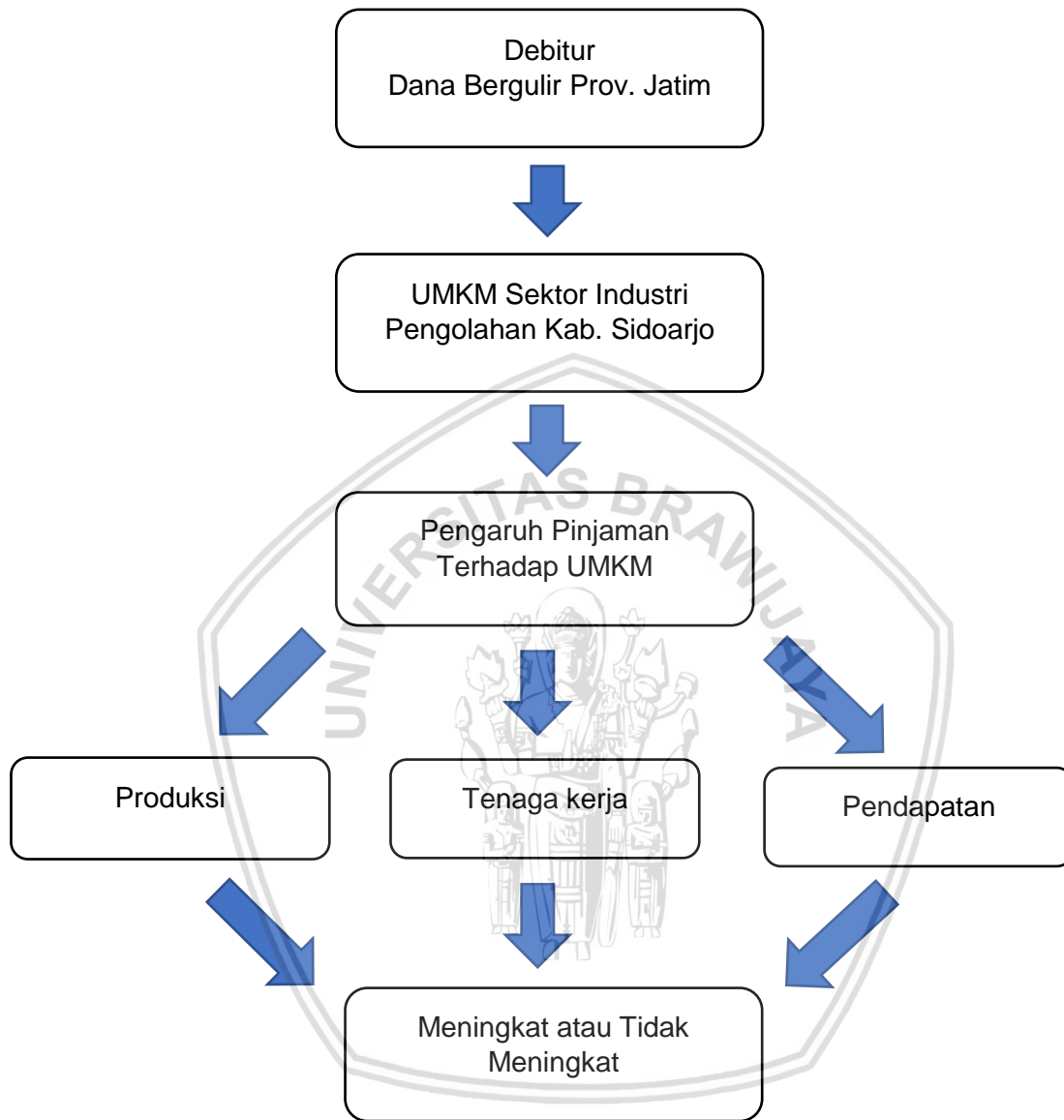
2.4 Studi Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan	Pendekatan/Jenis Penelitian	Variabel dan Indikator	Finding
1	Prasastiany, 2015, Analisis Dampak Penyaluran Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo pada Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidoarjo	Mengetahui pengaruh kredit dana bergulir Kab. Sidoarjo terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Penelitian studi kasus atau lapangan. Menggunakan metode kualitatif	Tenaga Kerja, Produksi, Omset Penjualan	Debitur meminjam dari dana bergulir Kab. Sidoarjo karena ketentuan agunan dan bunga tidak memberatkan
					Kredit dana bergulir Kab. Sidoarjo tidak meningkatkan tenaga kerja, namun meningkatkan produksi barang sekaligus omset penjualan
2	Setiawan dan Rejekiingsih, 2009, Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Memberikan informasi terkait kemanfaatan program dana bergulir bagi penerima dana bergulir	Teknik analisis uji statistik peringkat bertanda Wilcoxon dan uji korelasi parsial	Tenaga Kerja, Modal Usaha, Omset Penjualan, dan Keuntungan	Dari 150 UKM: Sebesar 42,67% tenaga kerja meningkat, sebesar 80,67% modalnya meningkat, sebesar 86% omset penjualan meningkat, dan sebanyak 74% merasa memiliki keuntungan setelah meminjam kredit dana bergulir.

No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan	Pendekatan/Jenis Penelitian	Variabel dan Indikator	Finding
3	(Deputi bidang pengkajian sumberdaya UKMK), 2006, Pengkajian Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Yang Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal	Menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi lokal terhadap kinerja UMKM	Pendekatan strategis	Pendapatan Asli Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Produk Domestik Regional Bruto; Jumlah Tenaga Kerja; Komoditas unggulan; Investasi; Jumlah Unit Usaha; Nilai Bahan Baku; Nilai Produksi; Produksi; Permodalan; Pemasaran; Persaingan; Kewirausahaan	UKM didaerah kebanyakan memiliki tenaga kerja 1-10 orang
					Modal usaha kurang atau sama dengan 10 juta (53,8%); 11-20 juta (15,2%); 21-40 juta (12,4%).
					UKM cenderung langsung memasarkan barang produksinya daripada menggunakan jaringan distribusi
					Pengembangan ekonomi lokal secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja UKM yang diukur dengan laju perubahan nilai tambah dan produktivitasnya .

No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan	Pendekatan/Jenis Penelitian	Variabel dan Indikator	Finding
4	Andrianto, 2017, Pengaruh Pembiayaan Kompetitif Terhadap Upaya Pengurangan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur	Menganalisa pengaruh aspek pembiayaan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda	Tingkat pengangguran Jawa Timur (Y), Pertumbuhan kredit, perkembangan UMKM, periode kebijakan JATIMNOMICS	Hasil dari program pembiayaan kompetitif pemberian kredit lunak terhadap UMKM berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah pengangguran
5	Anisyah, 2011. Analisis Perkembangan Industri Batik Semarang	Menganalisis perkembangan Batik Semarang	Kuantitatif Deskriptif, Uji Wilcoxon	Modal Usaha; Ongkos Produksi; Tenaga Kerja; Jumlah Pembeli; Total Penjualan; dan Keuntungan	Masing-masing variabel penelitian telah mengalami kenaikan yang signifikan setelah mendapatkan bantuan.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018

Kerangka pikir dari penelitian ini yaitu debitur dari dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meminjam dana baik dari Bank Jawa Timur maupun Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari seluruh populasi debitur yang meminjam dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, difokuskan

lagi kepada UMKM sektor industri pengolahan yang lokasinya berada di Kabupaten Sidoarjo. Dari seluruh UMKM sektor industri pengolahan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, difokuskan lagi menjadi UMKM yang proses produksinya masih banyak menggunakan tenaga kerja atau disebut juga UMKM kerajinan tangan. UMKM kerajinan tangan dapat berupa UMKM yang bergerak dibidang produksi sepatu/sandal, tas, dompet, dan mebel. Dari sampel yang sudah ditentukan tersebut, akan diteliti pengaruh antara sebelum sesudah UMKM melakukan pinjaman. Terdapat tiga variabel yang akan diteliti, yaitu produksi, tenaga kerja, dan pendapatan umkm. Produksi dilihat dari seberapa banyak unit perubahannya ketika UMKM sebelum melakukan pinjaman, dan setelah melakukan pinjaman. Tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak perubahan orang yang bekerja di UMKM tersebut, ketika UMKM sebelum melakukan pinjaman, dan setelah melakukan pinjaman. Pendapatan dilihat dari seberapa banyak perubahan pendapatan yang diterima oleh UMKM, ketika UMKM sebelum melakukan pinjaman, dan setelah melakukan pinjaman. Setelah itu, dari ketiga variabel tersebut akan dianalisis menggunakan uji Wilcoxon untuk melihat apakah UMKM tersebut mendapat dampak positif setelah mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau hasil analisis dari rumusan masalah yang jawabannya belum dengan data. Jawaban sementara ini digunakan penulis sebagai acuan untuk mencari tahu kebenarannya. Hipotesis ilmiah ini mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Dugaan sementara dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif terhadap jumlah

produksi, tenaga kerja, dan pendapatan UMKM setelah mendapatkan pinjaman kredit dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pinjaman yang dilakukan oleh UMKM debitur Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara sebelum mendapatkan pinjaman dan setelah mendapatkan pinjaman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang tergolong sebagai penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:29) metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan metode statistik. Sedangkan menurut Sulistyaningsih (2012:8), metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis. Jika penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka penelitian ini hanya dapat menggambarkan pembiayaan yang dilakukan oleh UMKM tersebut dan tidak akan mencapai tujuan dari penelitian ini.

Penelitian ini juga dapat digolongkan menjadi penelitian yang menggunakan analisis komparatif, menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013:167), analisis komparatif adalah bentuk analisis variabel (data) yang fungsinya adalah untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok variabel atau lebih. Sedangkan menurut Sulyanto (2014:2), penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan sampel yang satu dengan sampel; yang lain,

baik itu sampel bebas maupun sampel berpasangan. Teknik statistik yang digunakan dalam analisis komparatif ini adalah uji statistik, yaitu pengujian hipotesis komparatif, uji perbedaan ini juga dapat disebut sebagai uji signifikansi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur merupakan dana yang bersumber dari APBD Jawa Timur, di mana tentunya kredit dana bergulir ini hanya ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah debitur dan jumlah pinjaman yang cukup banyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Waktu penelitian dari penelitian ini yaitu Juli 2018. Dalam waktu yang telah ditentukan peneliti melakukan observasi terhadap UMKM yang meminjam kredit dana bergulir yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional sangat dibutuhkan guna mempermudah selama berjalannya penelitian, terutama pada penelitian kuantitatif. Definisi operasional merupakan variabel yang digunakan untuk membuka kemungkinan dilakukan sebagai dasar penelitian lanjutan bagi orang lain (Sulistyaningsih, 2012:61).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu pinjaman kredit, tenaga kerja, serta pendapatan. Berikut adalah definisi operasional variabel dari penelitian ini:

a. Pinjaman Kredit

Besar kecilnya suatu pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur, sehingga pinjaman yang diberikan tersebut dapat digunakan oleh debitur untuk mengembangkan usahanya.

b. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu UMKM. Satuan yang digunakan dalam mengukur tenaga kerja ini adalah berdasarkan jumlah pekerja yang bekerja pada UMKM tersebut.

c. Pendapatan

Pendapatan atau keuntungan merupakan hasil dari penjualan barang. Di mana yang dimaksudkan disini ialah $TR = P \cdot Q$. Satuan yang digunakan dalam mengukur pendapatan UMKM ialah rupiah per bulan.

d. Produksi

Produksi dapat diartikan sebagai *output* yang dihasilkan dari proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun menjadi bahan jadi. Satuan yang digunakan dalam mengukur tingkat produksi ini ialah jumlah unit yang dihasilkan oleh UMKM.

3.4 Populasi dan Sampel

Pengertian populasi adalah sekelompok orang atau objek dengan satu karakteristik umum yang dapat diobservasi (Kuzma, 1984 dalam Sulistyaningsih 2012:64). Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek dari penelitian yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh

objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh debitur yang meminjam dana bergulir yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Sampel merupakan subset yang dicuplik dari populasi yang akan diamati dan diukur dalam penelitian, dikarenakan jumlah populasi yang terbatas, maka seluruh populasi dimasukkan sebagai sampel dari penelitian ini, sedangkan sampel dari penelitian ini ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*, pengertian dari *purposive sampling* ialah teknik *sampling* dengan suatu pertimbangan tertentu (Sulistyaningsih, 2012:74). Teknik ini digunakan penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan subjek-subjek yang memiliki karakteristik tertentu, atau mendapatkan kelompok-kelompok penelitian yang sebanding dengan karakteristik tersebut, sehingga sampel tersebut dapat dianalisis secara valid.

Berikut adalah Kriteria UMKM yang akan dipilih:

1. UMKM masih merupakan debitur aktif per Desember 2017
2. UMKM berdomisili di Kabupaten Sidoarjo
3. UMKM telah meminjam setidaknya selama 1 tahun
4. UMKM bergerak dibidang industri pengolahan

Maka dari itu, jumlah sampel yang akan diteliti pada penelitian ini akan disajikan dalam Tabel 3.1 sejumlah:

Tabel 3.1: Jumlah Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Debitur aktif dana bergulir Pemprov. Jatim	3.175
2.	Berdomisili di Kabupaten Sidoarjo	201
3.	Pinjaman lebih dari 1 tahun	178
4.	Merupakan sektor industri pengolahan	30

Sumber: Data Dihimpun, 2018

3.5 Data dan Sumber Data

Keberadaan data mutlak dalam penelitian. Data (jamak; tunggal; datum) merupakan sekumpulan informasi; informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian (Martono, 2015:64).

3.5.1 Data

Data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono, 2015:65). Data primer merupakan data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang diambil langsung melalui teknik kuesioner serta wawancara. Pengisian angket/kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data atau suatu penelitian mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut

kepentingan umum (Sulistyaningsih, 2012:139). Sedangkan wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dengan seseorang sasaran penelitian atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Sulistyaningsih, 2012: 136).

2. Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data, dan hanya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain (Martono, 2015:66). Data sekunder ini bersifat menunjang keberadaannya saja, hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer.

3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang telah dihimpun oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan regulator dari adanya program dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah hal yang sangat penting bagi suatu penelitian. Tanpa adanya analisis data, maka sebuah penelitian akan diragukan. Dengan adanya analisis data dalam sebuah penelitian, maka penelitian tersebut akan lebih akurat untuk menggapai tujuan dari penelitian tersebut. Penentuan metode analisis data didasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan, maka dari itu penelitian ini menggunakan analisis data berupa uji normalitas dan uji T Sampel Berpasangan. Hal tersebut disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini tidak juga lupa memasukan uji

normalitas untuk melihat normalitas suatu data, karena hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji T Sampel Berpasangan.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah data uji mempunyai distribusi normal atau tidak. Data uji yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini menggunakan statistik Shapiro Wilk. Metode Shapiro Wilk dipilih karena metode ini merupakan metode yang efektif dan valid jika digunakan untuk sampel yang jumlahnya cenderung kecil (bagus untuk sampel berjumlah 30-50). Syarat Uji Shapiro Wilk yaitu:

1. Data berskala interval atau ratio (kuantitatif)
2. Data tunggal/belum dikelompokkan pada tabel frekuensi
3. Data dari sampel random

Dasar pengambilan keputusan dalam metode Shapiro Wilk ini dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai signifikansi $< 5\%$ maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi $> 5\%$ maka data berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Paired Sample T Test

Uji *Paired Sample T Test* atau uji T Sampel Berpasangan digunakan sebagai uji beda terhadap data yang diteliti yang berasal dari sejumlah responden yang sama pada suatu kelompok dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda. Uji T Sampel Berpasangan merupakan uji statistik parametrik, penggunaan uji ini disesuaikan dengan jumlah responden penelitian ini yang lebih dari 30 dan telah memenuhi unsur normalitas suatu data. Meskipun penelitian ini dapat diteliti

menggunakan metode regresi, namun guna mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan pinjaman. Maka dalam penelitian ini menggunakan *Paired Sample T Test*.

Berikut adalah langkah-langkah melakukan uji hipotesis menggunakan uji T Sampel Berpasangan menurut Supranto (2015:140):

1. Merumuskan kemungkinan hipotesis, yaitu H_0 dan H_1 .
di mana,
 H_0 = Tidak terdapat dampak positif pembiayaan terhadap produksi, tenaga kerja, dan pendapatan UMKM.
 H_1 = Terdapat dampak positif pembiayaan terhadap produksi, tenaga kerja, dan pendapatan UMKM.
2. Menetapkan titik kritis, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$
3. Menetapkan db, yaitu $db = n-1$
4. Menentukan t hitung dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{X}_D - \mu_0}{s_D / \sqrt{n}}$$

$$\bar{X}_d = \frac{\sum D}{n}$$

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

di mana:

D = Selisih x_1 dan x_2

n = Jumlah sampel

\bar{X} = Rata-rata

Sd = Standar Deviasi

5. Melakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya "t" hitung dengan tabel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 18 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 353 kelurahan yang tersebar di Kabupaten.

Dari seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo (2014), mata pencaharian penduduk Sidoarjo dibagi menjadi 12 kategori sebagai berikut:

Tabel 4.1: Penduduk Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	442.424
2.	TNI	370.106
3.	POLRI	408.391
4.	Swasta	182.925
5.	Wiraswasta/Pedagang	242.474
6.	Petani	155.236
7.	Pertukangan	36.150
8.	Buruh Tani	59.549
9.	Pensiunan	168.028
10.	Nelayan	14.667
11.	Pemulung	8.498
12.	Jasa	40.406
TOTAL		2.128.854

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014.

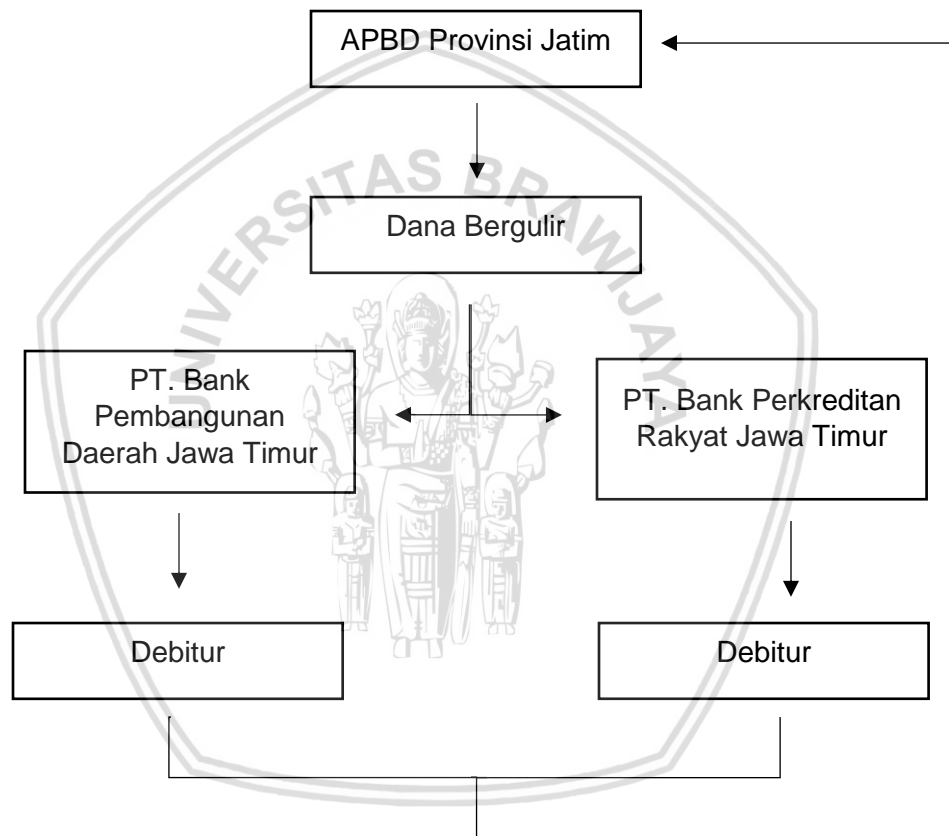
Mayoritas penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 442.424 orang. Sedangkan menurut data tersebut, jumlah masyarakat Sidoarjo yang memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta sebanyak 242.474 orang.

Penduduk yang berprofesi sebagai wiraswasta merupakan penduduk yang juga menjadi pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi beberapa sektor seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, batik, agribisnis, perdagangan, dan lainnya. Sektor-sektor usaha ini biasanya sudah memiliki kawasannya masing-masing. Contohnya, usaha kuliner berada di Kecamatan Sidoarjo; usaha kerajinan tangan di Kecamatan Tanggulangin; usaha batik di Jetis; usaha agribisnis di Kecamatan Sedati.

Dalam mengembangkan usahanya, pelaku UMKM tentunya membutuhkan modal. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku UMKM yaitu dengan melakukan pinjaman terhadap suatu lembaga tertentu untuk mengembangkan usahanya. Salah satu jenis pembiayaan yang dijadikan kreditur dari pada pelaku UMKM ini yaitu dana bergulir milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan perkuatan modal bagi Masyarakat Jawa Timur yang berada di wilayah Jawa Timur maupun di luar wilayah Jawa Timur. Dana Bergulir dapat dibagi menjadi kedalam dua sifat, Yang pertama yaitu dana bergulir bersifat umum, yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat Jawa Timur untuk modal kerja dan investasi. Sedangkan dana bergulir bersifat khusus yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat Jawa Timur dalam rangka stabilisasi harga pangan ditingkat produsen seperti, pembelian gabah/beras dan bahan pangan lainnya termasuk pengembangan lumbung pangan,

pengembangan cadangan pangan dipekarangan, kelembagaan pangan, sistem tunda jual dan teknologi pangan olahan, penyaluran pupuk petani dan teknologi peternakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur, aliran dana dari dana bergulir dijelaskan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1: **Alur Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2016.

Dari Gambar 4.1 di atas menjelaskan bahwa dana bergulir yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diberikan kepada pelaksana dana bergulir yaitu Bank Jatim dan BPR. Tugas dari pelaksana dana bergulir ini yaitu untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk

pinjaman/pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Pelaksana dana bergulir juga bertugas untuk menerima calon debitur serta menyeleksi calon debitur yang akan diberikan pembiayaan tersebut, serta menerima angsuran kredit dari debitur yang telah dipilih. Masyarakat Jawa Timur yang berhak mendapatkan pinjaman dana bergulir ialah masyarakat yang memiliki usaha dalam bentuk mikro/kecil/menengah/koperasi. Berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank pelaksana terhadap calon debitur, pastinya memiliki bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur. Besarnya bunga pinjaman di atur dalam pasal 2, ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

(2) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

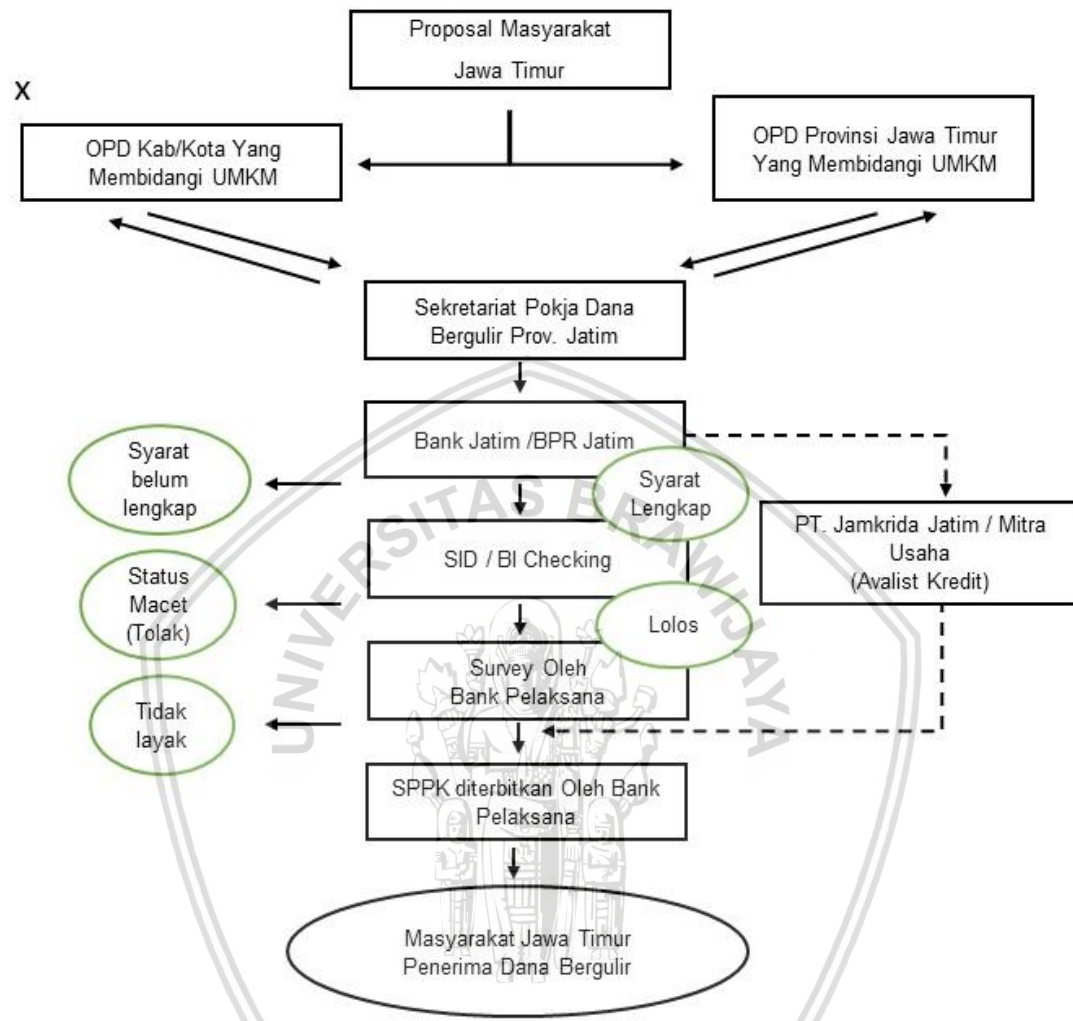
- a) Pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) flat per tahun menurun tahunan;
- b) Pinjaman di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) flat per tahun menurun tahunan;
- c) Pinjaman kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus entrepreneur berada pada level start up dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) flat per tahun menurun tahunan.

(3) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus adalah sebesar 3% (tiga persen) flat per tahun menurun tahunan.

setelah angsuran kredit diterima oleh bank pelaksana, dana tersebut dikembalikan lagi menjadi APBD Provinsi Jawa Timur tahun selanjutnya dan digulirkan lagi untuk melayani debitur baru di tahun berikutnya.

Dalam kondisi ketika calon debitur ingin mengajukan pinjaman dana dari program dana bergulir ini, berikut adalah Gambar 4.2 tentang bagaimana alur yang harus dilalui oleh calon debitur dalam meminjam dana bergulir:

Gambar 4.2: Alur Calon Debitur Mendapatkan Pinjaman



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 24 Tahun 2016

Sebelum melakukan pinjaman dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal pertama yang harus dilakukan oleh calon debitur adalah melengkapi persyaratan berkas sebagai upaya permohonan kredit. Permohonan kredit dapat diberikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (kemudian diteruskan ke pihak bank) maupun juga terhadap bank (Bank Jatim / BPR Jatim) secara langsung. Setelah permohonan kredit diterima oleh pihak bank, pihak bank akan melihat kelengkapan berkas dari calon debitur, bila kelengkapan berkas masih belum lengkap, maka berkas tersebut

akan dikembalikan langsung kepada calon debitur ataupun melalui Sekretariat Daerah. Ketika bank melihat kelengkapan berkas dari calon debitur, tidak hanya berkas yang bersifat kelengkapan diri dan UMKM saja yang harus disertakan dalam melengkapi berkas. Namun, dalam berkas tersebut juga harus disertakan agunan yang dijadikan jaminan ketika kredit yang dilakukan oleh debitur ini nantinya macet.

Dalam Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2016, apabila kredit dana bergulir diberikan pada pelaku UMKM, maka besaran agunan kredit sampai dengan Rp. 100.000.000 menurut taksiran harga umum minimal 50% dari jumlah plafon. Sedangkan bila kredit di atas Rp. 100.000.000 maka besar agunan minimal 75%. Namun, apabila kredit dana bergulir diajukan oleh penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* yang berada pada level *start up*. Level *Start Up* yang dimaksudkan disini adalah kondisi suatu usaha yang belum *feasible* and belum *bankable*. Penduduk yang memiliki usaha pada level *start up* tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan tambahan, tetapi harus dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist credit*).

Ketika berkas sudah lengkap, maka pihak Bank akan melakukan *Bank Checking* atau menggunakan SID (Sistem Informasi Debitur). Setelah pihak bank melihat status dari SID calon debitur, jika calon debitur masuk kedalam daftar kredit macet, maka permohonan tidak dapat diterima. Namun, jika masuk kedalam kategori tidak macet, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan pihak bank adalah melakukan survei / penilaian dan taksasi agunan oleh Bank Pelaksana. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon debitur ini layak (*feasible*), sehingga pihak bank dapat memberikan kredit kepada calon debitur tersebut. Jika agunan yang dijaminakan tidak sesuai dengan ketentuan, maka pihak bank menerbitkan surat penolakan

beserta alasannya kepada calon debitur. Namun, jika agunan yang dijaminkan sudah sesuai dengan ketentuan, maka pihak bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada calon debitur dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah.

Setelah UMKM mendapatkan pembiayaan dari bank yang bersangkutan, dana yang didapatkan umumnya akan digunakan untuk mengembangkan usahanya. Seiring dengan berjalannya waktu supaya pinjaman dapat terlihat dampaknya. Hal tersebut juga bergantung pada pengelolaan dana, serta apa yang menjadi target UMKM dari pinjaman yang telah berhasil dipinjam. Tujuan UMKM dalam melakukan pinjaman terutama dana bergulir ini yaitu untuk melakukan pengembangan UMKM disektor ekspansi usaha, hal ini berarti bisa berarti menambah tempat usaha, tenaga kerja, maupun alat produksinya. Selain itu, terdapat UMKM yang juga melakukan pinjaman dengan tujuan jangka pendek. Maksud dari jangka pendek disini ialah pinjaman tersebut digunakan untuk skala produksi yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Umumnya hal tersebut dikarenakan adanya jumlah pesanan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pesanan di bulan-bulan sebelumnya.

Penelitian ini memiliki jumlah responden sebanyak 30 orang / UMKM. Dengan jumlah tersebut, UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki keragaman. Keaneka ragaman UMKM tersebut dapat dilihat dari daerah tempat UMKM, usaha yang dijalani oleh UMKM, lama berjalannya usaha, waktu pinjaman UMKM, dan lain sebagainya. Berdasarkan Kriteria UMKM yang disampaikan di Tabel 2.1, UMKM yang menjadi responden dari penelitian ini semuanya masuk kedalam kategori usaha mikro. Hal ini disebabkan karena kekayaan bersih belum mencapai

Rp. 50.000.000 dan belum mencapai rata-rata penghasilan pertahun sebesar Rp. 300.000.000 atau dalam 1 bulan mencapai Rp. 25.000.000.

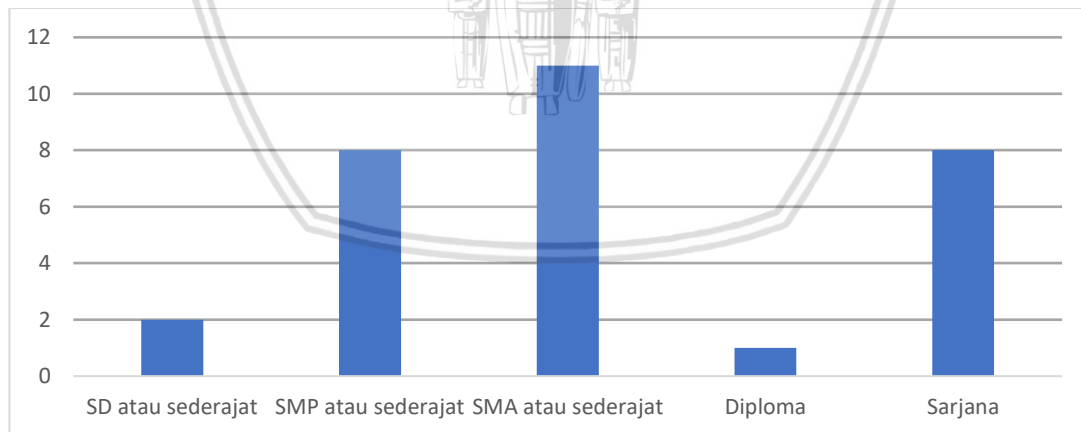
4.2 Responden Penelitian

Responden penelitian adalah bagian di mana akan dijelaskan terkait dengan karakteristik responden yang menjadi responden dalam penelitian ini. Responden penelitian dibagi kedalam dua kategori, yang pertama ialah karakteristik responden yaitu pemilik usahanya, dan yang kedua ialah karakteristik UMKM nya. Berikut ini adalah beberapa penjabaran dari responden penelitian maupun UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini:

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah Gambar 4.3 mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikannya:

Gambar 4.3: **Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: Data lapang, 2018.

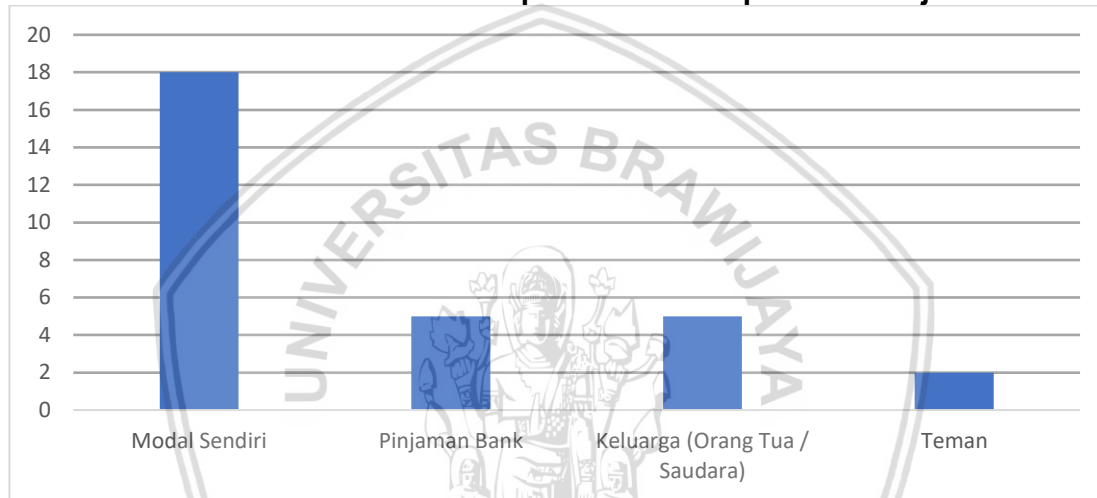
Berdasarkan hasil survei penelitian terkait debitur dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mayoritas responden berada pada lulusan SMA sebanyak 11

orang, kemudian diikuti oleh lulusan SMP dan sarjana sebanyak 8 orang, SD 2 orang, dan yang terakhir lulusan diploma 1 orang.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Modal

Berikut adalah Gambar 4.4 mengenai karakteristik responden berdasarkan sumber modalnya:

Gambar 4.4: **Sumber Modal Awal Responden di Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: Data lapang, 2018.

Berdasarkan hasil survei penelitian terkait debitur dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 18 orang menggunakan modal sendiri untuk memulai usaha. Modal sendiri yang dipakai untuk memulai usaha oleh pelaku UMKM tersebut didapat sebelum pelaku UMKM memulai usaha tersebut. Yang dimaksudkan disini ialah pelaku UMKM sebelumnya sudah bekerja ditempat lain, dan ketika modal yang dikumpulkan dirasa sudah cukup untuk memulai suatu usaha. Pelaku UMKM yang memilih menggunakan modalnya sendiri untuk memulai usaha juga memiliki kondisi awal yang berbeda-beda, beberapa pelaku UMKM masih bekerja dan memiliki usaha sampingan yaitu mendirikan UMKM-nya, beberapa lainnya memilih untuk berhenti

dari pekerjaan sebelumnya dan memulai usahanya yang baru, dan terdapat juga pelaku UMKM yang memulai usahanya dikarenakan sebelumnya terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Dari 30 responden penelitian, 5 orang di antaranya mendapatkan modal usaha yang bersumber dari pinjaman bank maupun juga dari keluarga. Di antara 5 orang yang modal awalnya bersumber dari pinjaman bank, tidak ada yang sebelumnya meminjam melalui dana bergulir namun melalui akses pembiayaan lainnya yang dapat digunakan untuk memulai usaha.

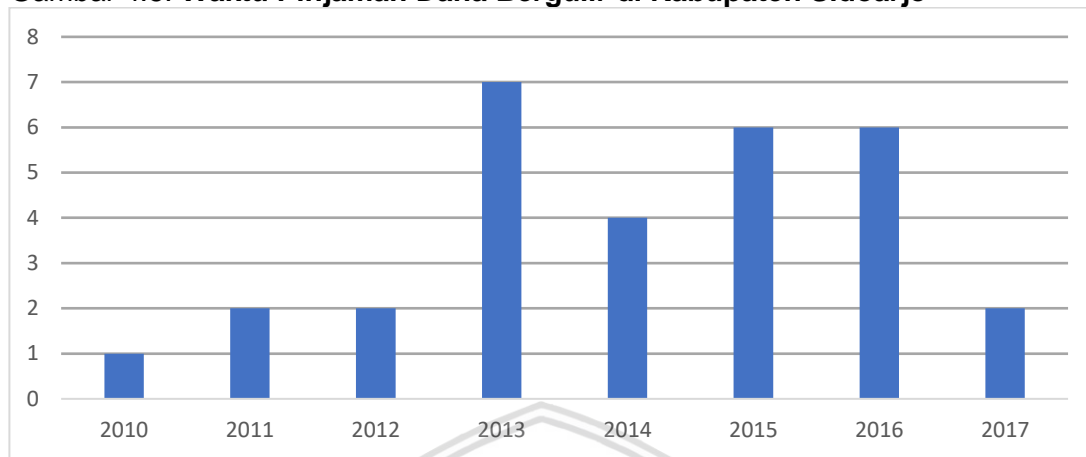
Terakhir, 2 orang lainnya mendapatkan sumber awal modal dari temannya. Mekanisme modal awal yang diperoleh dari teman pelaku UMKM dalam menjalankan usaha terdapat perjanjian khusus di antara kedua belah pihak. Seperti, adanya sistem bagi hasil bagi pelaku UMKM maupun pemberi modal. Hal ini dikarenakan pemberi modal dijadikan sebagai sebuah mitra ataupun pemilik saham bagi UMKM tersebut.

Masyarakat pelaku UMKM cenderung menggunakan modalnya sendiri dalam memulai usaha, hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM memilih cara yang lebih aman dibandingkan dengan melakukan pinjaman ke pihak bank. Alasan paling umum yang menyebabkan pelaku UMKM memilih menggunakan uang sendiri yaitu takut jika usahanya gagal maka tidak dapat mengangsur cicilannya, dan pelaku UMKM merasa ketika usahanya masih belum berjalan dengan baik, pihak perbankan tidak akan memberikan calon debiturnya pinjaman.

4.2.3 Karakteristik UMKM Berdasarkan Waktu Pinjaman

Berikut adalah Gambar 4.5 mengenai karakteristik dari responden dana bergulir berdasarkan waktu peminjamannya:

Gambar 4.5: Waktu Pinjaman Dana Bergulir di Kabupaten Sidoarjo

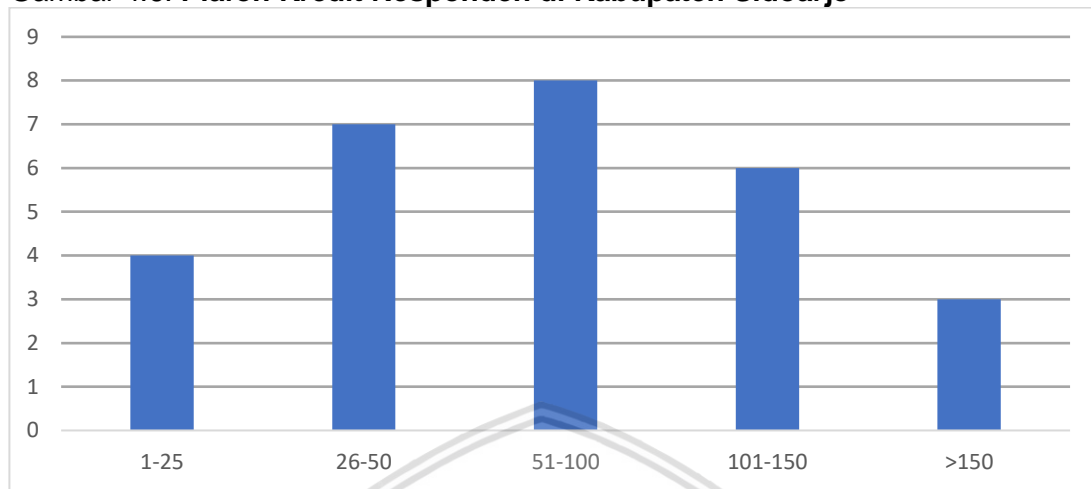


Sumber: Data lapang, 2018.

Berdasarkan hasil survei penelitian terkait debitur dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, paling banyak debitur berada di antara tahun 2013-2016 di mana total dari peminjam di tahun-tahun tersebut mencapai 23 debitur atau mencapai 76,6% dari keseluruhan responden. Alasan mengapa paling banyak debitur dana bergulir berada ditahun 2013-2016 dikarenakan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018, di mana debitur masih tergolong baru dalam meminjam pinjamannya, serta debitur masih ingat terhadap kondisi UMKM ketika UMKM tersebut sebelum meminjam dana bergulir dan setelah UMKM meminjam dana bergulir.

4.2.4 Karakteristik UMKM Berdasarkan Plafon Kredit

Berikut adalah Gambar 4.6 mengenai karakteristik mengenai seberapa banyak plafon kredit yang didapatkan debitur ketika meminjam dana bergulir:

Gambar 4.6: **Plafon Kredit Responden di Kabupaten Sidoarjo**

Sumber: Data lapang, 2018.

Berdasarkan hasil survei penelitian terkait debitur dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, debitur yang meminjam dana bergulir terbanyak berada dikisaran Rp. 51.000.000 – Rp. 100.000.000 sebanyak 7 orang. Kemudian plafon kredit terbanyak kedua yang berada dikisaran Rp. 26.000.000 – Rp. 50.000.000 sebanyak 7 orang. Yang paling sedikit di antara semua kisaran plafon kredit, yaitu yang berada di atas Rp. 150.000.000 yaitu sebanyak 3 orang.

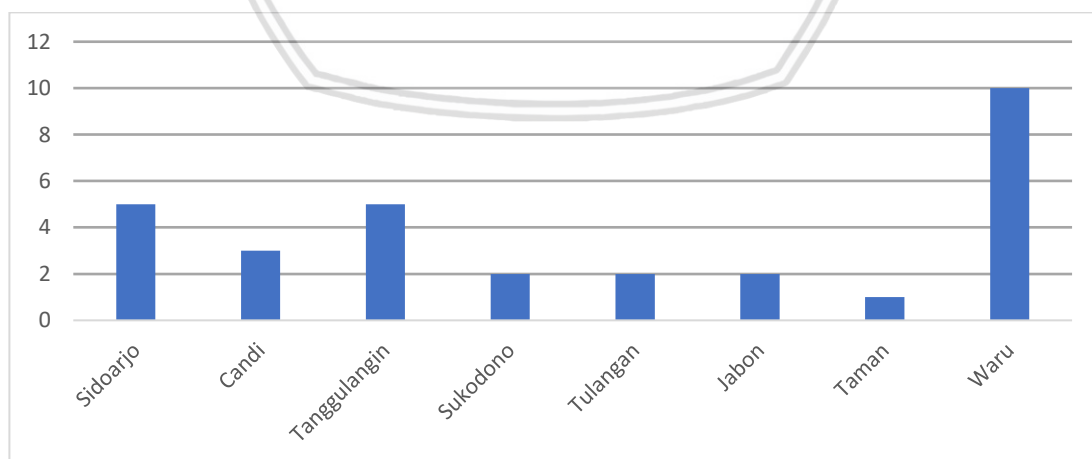
Berdasarkan temuan yang didapatkan, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan plafon kredit yang diajukan oleh suatu UMKM dapat rendah, maupun dapat tinggi. Faktor yang pertama ialah faktor besar kecilnya UMKM ketika akan meminjam, ketika UMKM tersebut masih kecil, maka pinjaman yang dipinjam oleh UMKM tersebut masih tergolong kecil. Namun, ketika UMKM tersebut sudah berkembang sebelum UMKM tersebut melakukan pinjaman, maka plafon kredit yang diajukan oleh UMKM tersebut jumlahnya cenderung besar. Faktor kedua ialah industri apa yang sedang dijalani oleh UMKM tersebut, semisal UMKM tersebut bergerak

dibidang konveksi, ataupun kerajinan tangan. Maka pinjamannya tidak terlalu besar, berbeda halnya dengan industri yang bergerak disektor makanan, di mana dalam produksinya memerlukan biaya yang cukup tinggi, maka plafon yang diajukan juga tinggi. Faktor ketiga ialah, target yang dipasang oleh UMKM tersebut. Yang dimaksud target disini ialah UMKM dalam meminjam kredit ini memiliki tujuan apa. Semisal yang dituju hanyalah tujuan jangka pendek seperti untuk memenuhi pesanan yang besar dalam jangka pendek, maka UMKM akan meminjam dana tidak terlalu besar. Berbeda dengan UMKM yang tujuannya adalah ekspansi bisnis, ketika UMKM memikirkan jangka panjang dan ingin melakukan ekspansi, maka plafon kredit yang diajukan cenderung lebih tinggi dibandingkan yang hanya memenuhi pesanan dalam jangka pendek saja.

4.2.5 Karakteristik UMKM Berdasarkan Asal Kecamatan

Berikut adalah Gambar 4.7 mengenai asal daerah (kecamatan) responden penelitian terkait dana bergulir di Sidoarjo:

Gambar 4.7: Asal Kecamatan Responden di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Data lapang, 2018.

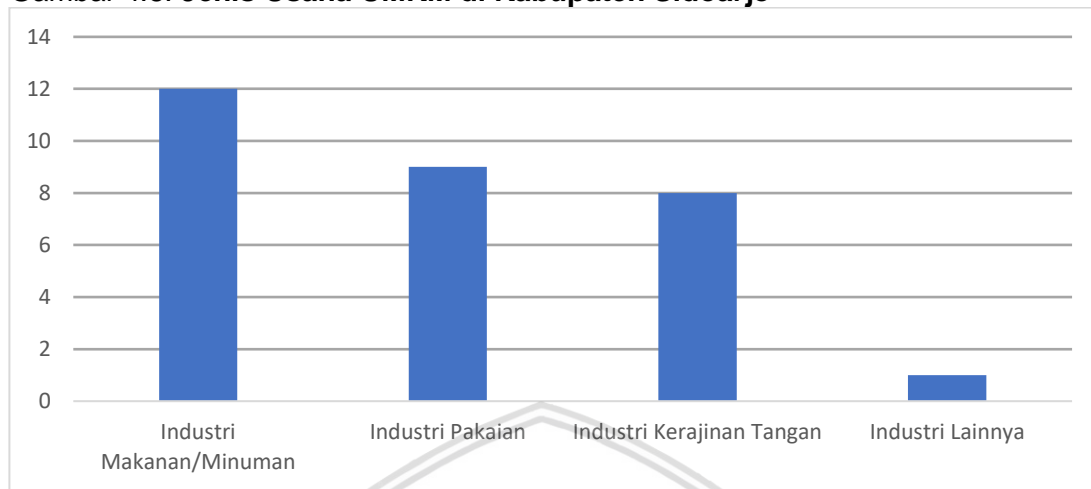
Berdasarkan hasil penelitian dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo, responden paling banyak yaitu berjumlah 10 responden berasal dari Kecamatan Waru, kemudian Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Tanggulangin masing-masing terdapat 5 responden. Sedangkan responden lainnya tersebar di beberapa kecamatan di Sidoarjo seperti Kecamatan Candi, Sukodono, Tulangan, Jabon, dan Taman.

Mayoritas UMKM yang diteliti dan melakukan pinjaman ialah UMKM yang berada di lokasi strategis. Maksud dari strategis disini yaitu seperti Kecamatan Waru merupakan Kecamatan yang dekat dengan Kota Surabaya, sehingga UMKM yang berada di Kecamatan Waru ini juga cenderung bekerja sama dengan pabrik-pabrik ataupun pasar yang berada di Kota Surabaya. Kecamatan Sidoarjo merupakan Kecamatan yang intensitas perekonomian dan perputaran ekonominya cukup besar, maka Kecamatan Sidoarjo juga memiliki jumlah UMKM yang tinggi. Selain itu seperti Kecamatan Tanggulangin dan Candi, merupakan kecamatan yang daerahnya merupakan Kawasan industri khusus, seperti Kecamatan Tanggulangin yang banyak memproduksi kerajinan seperti sepatu, tas, sandal, dompet, dan lain sebagainya.

4.2.6 Karakteristik UMKM Berdasarkan Jenis Usahanya

Berikut adalah Gambar 4.8 mengenai jenis usaha UMKM:

Gambar 4.8: Jenis Usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Data lapang, 2018.

Berdasarkan hasil survei terkait dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo, jenis usaha yang paling banyak dimiliki oleh responden penelitian ialah industri makanan, sebanyak 12 UMKM yang terdiri dari katering, kerupuk, coklat, kue, bahan makanan, jamu, dan susu. Kemudian diikuti sebanyak 10 UMKM yang bergerak di industri pakaian seperti konveksi. Ketiga terdapat industri yang bergerak dibidang kerajinan tangan, industri kerajinan tangan di Kabupaten Sidoarjo yang dimaksud seperti tas, sepatu, dan rotan. Terakhir yaitu terdapat industri lainnya, di mana industri ini bidangnya berbeda dibandingkan dengan ketiga industri sebelumnya, yaitu industri konstruksi ban.

Industri makanan dan minuman yang berada di Sidoarjo merupakan Industri yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo. Bahkan menurut BPS (2016), jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang bergerak dibidang makanan dan minuman berada diperingkat pertama, yaitu sejumlah 179 industri. Alasan UMKM membuka usaha dibidang makanan dan minuman ini dikarenakan

makanan dan minuman adalah hal pokok yang harus dimiliki oleh manusia, sesuai dengan penduduk Kabupaten Sidoarjo yang cukup padat. Hal tersebut yang mendasari kenapa UMKM di Sidoarjo banyak yang membuka usaha dibidang tersebut. Kedua ialah industri pakaian, alasan UMKM bergerak dibidang ini hampir sama dengan industri makanan/minuman, yaitu salah satu unsur yang harus dimiliki manusia yaitu sandang. Hal itu juga dapat dilihat dari banyaknya toko baju yang bersebaran di Kabupaten Sidoarjo. Terakhir ialah industri kerajinan tangan, industri kerajinan tangan ini jumlahnya cukup banyak di Sidoarjo, karena Sidoarjo juga banyak daerah yang terkenal akan usaha kerajinan tangannya, seperti sepatu, tas, kemudian juga batik sidoarjo.

4.3 Hasil Penelitian

Sebelum melakukan tahap uji hipotesis (Uji T sampel berpasangan) pada penelitian ini, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji T ini yaitu data harus berdistribusi normal. Uji normalitas data diperlukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan uji hipotesis selanjutnya. Jika data sudah lolos dalam uji normalitas, maka data tersebut sudah dapat digunakan untuk melakukan uji T sampel berpasangan. Namun, apabila setelah melalui uji hipotesis data tersebut tidak lolos uji normalitas, maka harus menggunakan uji Wilcoxon (non parametrik) sebagai pengganti uji T sampel berpasangan.

4.3.1 Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas data menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Pemilihan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* didasari oleh sampel penelitian yang berjumlah 30 responden (responden tidak terlalu banyak). Dari hasil uji ini apabila pengujian memiliki probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal,

namun sebaliknya jika hasil pengujian $< 0,05$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data menggunakan uji *Shapiro-Wilk* dapat dilihat melalui Gambar 4.9 di bawah ini:

Gambar 4.9: Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ProduksiX	.131	30	.200	.942	30	.106
ProduksiY	.139	30	.142	.935	30	.066
TenagaKerjaX	.161	30	.045	.934	30	.061
TenagaKerjaY	.162	30	.042	.931	30	.052
PendapatanX	.141	30	.131	.935	30	.065
PendapatanY	.112	30	.200*	.948	30	.148

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2018.

Tabel di atas menjelaskan terdapat 6 variabel, yaitu produksi, tenaga kerja, dan pendapatan. Sedangkan maksud dari keterangan X dan Y dibelakang variabel ialah X untuk sebelum, dan Y untuk sesudah. Hasil masing-masing variabel uji normalitas data penelitian dana bergulir Pemerintah Provinsi memperoleh nilai probabilitas $> 0,05$ yang ditunjukkan pada kolom *Sig.* sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan dapat menggunakan Uji T Sampel Berpasangan (*Paired sample T-Test*).

4.3.2 Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji normalitas data, maka langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji T Sampel Berpasangan (*Paired sample T-Test*) karena data

berdistribusi normal. Berikut merupakan Gambar 4.10 yang menjelaskan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan:

Gambar 4.10: Hasil Uji T Sampel Berpasangan

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	ProduksiX - ProduksiY	-42.33333	44.36785	8.10042	-58.90056	-25.76611	-5.226	29	.000
Pair 2	TenagaKerjaX - TenagaKerjaY	-1.16667	1.08543	.19817	-1.57197	-.76136	-5.887	29	.000
Pair 3	PendapatanX - PendapatanY	-2900000.00	2294671.489	418947.7788	-3756844.42	-2043155.58	-6.922	29	.000

Sumber: Data diolah, 2018.

Berdasarkan hasil dari uji T sampel berpasangan antara sebelum dan sesudah (sebelum meminjam diberikan simbol X, dan sesudah meminjam diberikan simbol Y) UMKM menerima pembiayaan, pada variabel produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan mempunyai signifikansi sebesar 0.00. Hal tersebut menandakan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang artinya ialah H_0 ditolak dan secara otomatis H_1 yang diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kredit yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program dana bergulir, telah berhasil mengembangkan UMKM yang meminjam dana dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikansi variabel produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan yang telah diuji.

4.4 Dampak Positif Pembiayaan Pada UMKM Di Kabupaten Sidoarjo

Debitur dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi responden dari penelitian ini sebanyak 30 responden. Dari 30 responden tersebut terdapat beragam jenis usaha, latar belakang responden, jenis usaha, maupun plafon kredit yang didapatkan oleh responden tersebut. Setelah

dilakukan uji hipotesis menggunakan Uji T sampel berpasangan dengan menggunakan alpha sebesar 5%, hasil menunjukkan bahwa pembiayaan dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki dampak yang positif terhadap sisi produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan dari UMKM tersebut.

Setelah 30 responden diteliti terkait dengan produksi, tenaga kerja, serta pendapatan, beragam respon telah ditemukan. Sebanyak 27 UMKM atau 90% dari UMKM yang diteliti produksinya meningkat. 2 UMKM tidak mengalami peningkatan produksi setelah mendapatkan pembiayaan, dan 1 UMKM justru mengalami penurunan produksi setelah meminjam dana bergulir. Mayoritas produksi UMKM meningkat dikarenakan pembiayaan yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur paling besar digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, seperti peningkatan tenaga kerja, ekspansi mesin ataupun tempat usaha. Salah satu penyebab UMKM tidak meningkatkan kapasitas produksinya ataupun berkurang disebabkan oleh manajemen UMKM yang masih buruk, selain itu adanya serbuan barang asing juga membuat permintaan akan barang tersebut berkurang drastis.

Melihat dari variabel tenaga kerja, sebanyak 23 UMKM atau 76.6% dari UMKM yang diteliti mengalami peningkatan tenaga kerja. Sebanyak 6 UMKM tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tenaga kerja ketika diteliti, dan sisanya terdapat 1 UMKM yang justru mengalami penurunan tenaga kerja. Alasan tidak terjadinya peningkatan maupun penurunan tenaga kerja terjadi, karena kondisi tenaga kerja yang masih mumpuni dan tidak memerlukan penambahan tenaga kerja. Namun untuk UMKM yang tenaga kerjanya berkurang, alasannya sama dengan penurunan

produksi, yaitu karena permintaan barang sudah menurun, sehingga pemutusan hubungan kerja harus terjadi.

Terakhir, jika dilihat dari variabel pendapatan UMKM, sebanyak 26 UMKM atau 86,6% dari UMKM yang diteliti mengalami peningkatan pendapatan. Di antara 30 UMKM tersebut, 2 di antaranya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pendapatan. Dan 2 UMKM lainnya, merasa mengalami penurunan setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir. Peningkatan pendapatan umumnya terjadi karena ketika UMKM merasa bahwa terdapat permintaan yang meningkat, maka UMKM tersebut akan mencari dana tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, maka dengan hal tersebut pendapatan UMKM pun akan meningkat. Namun UMKM yang tidak mengalami perubahan, terjadi karena UMKM tersebut gagal melakukan penetrasi terhadap pasar, sehingga permintaan terhadap barang tidak berubah dan menyebabkan pendapatan UMKM stagnan. Sedangkan untuk UMKM yang merasa pendapatannya justru turun terdapat dua hal, yang pertama dikarenakan permintaan terhadap barang yang diproduksi oleh UMKM tersebut turun (serbuan barang impor). Serta penggunaan pinjaman atau mekanisme dari UMKM tersebut dalam mengelola pinjaman, karena dalam penelitian ini ditemukan satu UMKM yang tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan usahanya, melainkan untuk dipinjamkan untuk pengembangan usaha dari saudaranya.

Peningkatan modal akibat pembiayaan dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan produksi. Dengan hal tersebut, peningkatan produksi juga akan mendorong pasar *input* berupa pasar tenaga kerja untuk masuk ke dalamnya. Kaitan antara produksi dan pendapatan juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TR = Q.P_q$$

di mana TR adalah *Total Revenue* (pendapatan usaha), Q adalah *Quantity* atau *output*, P_q adalah *Price* atau harga output (Boediono, 1982). Sehingga dalam hal ini terdapat hubungan antara produksi (*output*) dengan pendapatan UMKM. Apabila terjadi peningkatan produksi, maka juga akan meningkatkan pendapatan yang merupakan hasil perkalian dari jumlah produksi dikalikan dengan harga barang per unit.

Melihat data di atas, dari ketiga variabel yang diteliti mayoritas UMKM mengalami peningkatan dari segi produksi, tenaga kerja, maupun juga pendapatan UMKM tersebut. Namun dibagian ini akan dijelaskan seberapa banyak rata-rata peningkatan UMKM dari variabel yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah Tabel 4.2 mengenai rata-rata produksi, tenaga kerja, maupun juga pendapatan UMKM antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dana bergulir Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.2: Rata-rata Produksi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan

No.	Variabel	Rata-rata		Persentase Peningkatan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Produksi	96 unit	138 unit	30,5%
2.	Tenaga Kerja	4 orang	5 orang	20%
3.	Pendapatan	Rp. 8.866.667,00	Rp. 13.183.000,00	32,75%

Sumber: Data diolah, 2018.

Dari data dan penjelasan pada Tabel 4.2, variabel produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan UMKM mengalami peningkatan. Rata-rata produksi UMKM sebelum mendapatkan pinjaman dapat memproduksi sebanyak 96 unit, namun

setelah mendapatkan pinjaman rata-rata UMKM memproduksi sebanyak 138 unit atau meningkat sebanyak 30,5% terkait dengan kapasitas produksinya. Sedangkan dalam tenaga kerja, rata-rata peningkatan tenaga kerja dalam suatu UMKM yang awalnya hanya memiliki 4 tenaga kerja, setelah mendapatkan pinjaman meningkat menjadi 5 orang atau sebanyak 20%. Sedangkan pendapatan, yang rata-rata awalnya berada dikisaran Rp. 8.866.667, setelah mendapatkan pinjaman mengalami peningkatan menjadi Rp. 13.183.000. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hendra dan Tri Wahyu (2009) tentang analisis dampak dana bergulir bagi UKM, bahwa dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel tenaga kerja, dan omset penjualan mengalami peningkatan. Untuk tenaga kerja meningkat dari 4 orang menjadi 5 orang, sedangkan untuk omset penjualan meningkat dari Rp. 21.000.000 menjadi Rp. 28.000.000. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pinjaman, UMKM dapat meningkatkan produksinya yang di dalamnya terdapat tenaga kerja, begitu juga dengan pemasaran UMKM yang semakin luas serta memiliki pelanggan yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pinjaman. Hal serupa juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Indah (2010) tentang analisis usaha mikro monel yang memperoleh kredit dari dinas UMKM Kabupaten Jepara. Produksi yang awalnya memiliki rata-rata sebanyak 68 kodi per produksi, setelah mendapatkan pinjaman rata-rata produksi meningkat menjadi 175 kodi per produksi. Hal tersebut juga senada terhadap pendapatan UMKM. UMKM yang awalnya memiliki pendapatan berkisar Rp. 60.000.000 – Rp. 1.500.000, setelah mendapatkan kredit pendapatan meningkat menjadi kisaran Rp. 120.000 – Rp. 12.500.000.

Dengan terjadinya peningkatan dalam sektor produksi, tenaga kerja, dan pendapatan. Hal tersebut juga turut mensukseskan program Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, terutama dibidang pengentasan kemiskinan. Dana bergulir telah berhasil memberikan dampak yang baik. Dengan adanya dana bergulir ini, masyarakat Jawa Timur yang awalnya kesulitan untuk mengakses pembiayaan lebih dipermudahkan lagi dengan kebijakan-kebijakannya. Seperti tingkat suku bunga yang rendah, mengutip berita dari *detikfinance* tanggal 25 September 2017. Suku bunga kredit perbankan nasional per Juli 2017 rata-rata masih double digit yakni 11,73%, bahkan untuk kredit mikro rata-rata masih di atas 15%. Berbeda halnya dengan dana bergulir ini, suku bunga paling tinggi yang diberikan oleh Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim selaku *channeling agent* dari program ini hanyalah sebesar 6%. Selain itu, jika dilihat dari segi tenaga kerja, UMKM memang terbukti dapat menyerap tenaga kerja, karena dalam proses produksi UMKM sektor industri pengolahan tentunya membutuhkan tenaga kerja. Hal tersebut belum termasuk UMKM yang telah melakukan pinjaman melalui dana bergulir, setelah melakukan pinjaman dana bergulir justru UMKM karena memiliki modal yang lebih akan menyerap tenaga kerja lebih banyak untuk meningkatkan produksinya. Belum lagi dari segi pendapatan, pengentasan kemiskinan akan semakin mudah teratasi karena penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak serta pendapatan UMKM yang meningkat, berdasarkan Tabel 4.2 peningkatan pendapatan UMKM rata-rata meningkat sebanyak 32,75% dibandingkan sebelum melakukan pinjaman. Ditambah lagi kemudahan dalam mengakses dana bergulir ini, bagi masyarakat Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja dan ingin memulai usahanya, dapat difasilitasi oleh pemerintah juga dengan tidak memberikan agunan namun harus dijamin oleh *avalist credit*. Maka dari itu dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dimulai pada tahun 2001 masih tetap ada sampai saat ini dan tetap menarik perhatian masyarakat Jawa Timur karena keuntungannya.

Dalam maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka dari itu Tabel 4.3 akan menjelaskan ringkasan dari hasil penelitian ini:



Tabel 4.3: Ringkasan Hasil Penelitian

Rumusan Masalah	Variabel	Jumlah UMKM		Temuan	Kesimpulan	
Bagaimana Dampak Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap Produksi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Produksi	Meningkat	27	Permintaan pasar sedang tinggi	Signifikansi variabel produksi sebesar 0,00 (kurang dari 0,05). Artinya pembiayaan memiliki dampak positif bagi produksi UMKM.	Tidak semua UMKM mengalami peningkatan produksi. Hal tersebut bergantung pada kondisi pasar, beserta manajemen tata kelola UMKM dalam menyikapi pinjaman.
		Tetap	2	Pinjaman digunakan untuk pengembangan lainnya		
		Menurun	1	Manajemen UMKM buruk Permintaan pasar berkurang		
	Tenaga Kerja	Meningkat	23	Kapasitas produksi meningkat	Signifikansi variabel tenaga kerja sebesar 0,00 (kurang dari 0,05). Artinya pembiayaan memiliki dampak positif bagi tenaga kerja UMKM.	Tidak semua UMKM mengalami peningkatan tenaga kerja. Hal tersebut bergantung pada kebutuhan UMKM terhadap seberapa banyak produksi yang akan dihasilkan oleh UMKM tersebut.
		Tetap	6	Tenaga kerja cukup		
		Menurun	1	Permintaan pasar berkurang		

Rumusan Masalah	Variabel	Jumlah UMKM		Temuan		Kesimpulan	
	Pendapatan	Meningkat	26	Penetrasi pasar baik	Permintaan pasar tinggi	Signifikansi variabel produksi sebesar 0,00 (kurang dari 0,05). Artinya pembiayaan memiliki dampak positif bagi pendapatan UMKM.	Tidak semua UMKM mengalami peningkatan tenaga kerja. Hal tersebut bergantung pada keberhasilan penetrasi terhadap pasar, maupun juga pada manajemen tata kelola UMKM dalam menyikapi pinjaman.
		Tetap	2	Penetrasi Terhadap Pasar Kurang			
		Menurun	2	Manajemen UMKM buruk			

Sumber: Data diolah, 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peningkatan modal terhadap UMKM, dalam hal ini melalui pembiayaan dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap debitur dana bergulir di Kabupaten Sidoarjo memiliki dampak positif. Seperti yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, hasil penelitian yang diperoleh mendapatkan kesimpulan yaitu dana bergulir yang merupakan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masyarakat di Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki dampak positif baik dalam segi produksi, tenaga kerja, maupun pendapatan bagi UMKM.

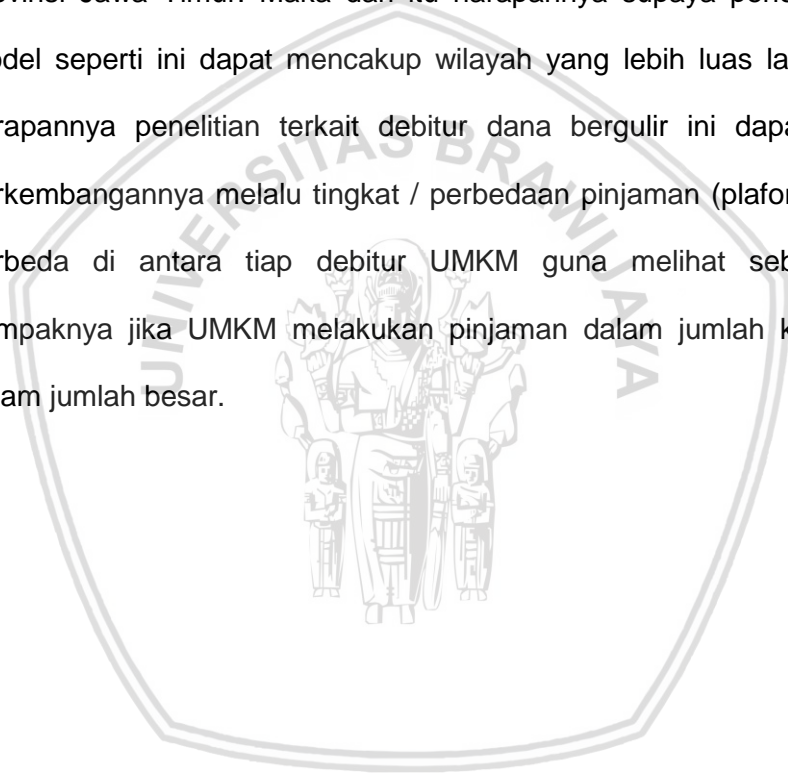
5.2 Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya kebaruan dan kelengkapan data dari waktu ke waktu, hal ini guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengontrol seluruh pelaku UMKM yang meminjam dana melewati dana bergulir serta tambahan data kuantitatif terkait UMKM guna mengetahui perkembangan UMKM antara sebelum dan sesudah meminjam dana bergulir.
2. Adanya peningkatan dana yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dikarenakan dana tersebut telah berhasil digunakan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur alangkah lebih baiknya jika semakin sering melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM supaya UMKM di Provinsi

Jawa Timur, khususnya para debitur. Hal ini merupakan upaya agar kinerja UMKM semakin baik lagi guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta peningkatan ekonomi bagi Jawa Timur itu sendiri.

4. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya mencakup lingkup yang tidak terlalu besar (hanya Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mencakup seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu harapannya supaya penelitian dengan model seperti ini dapat mencakup wilayah yang lebih luas lagi. Selain itu, harapannya penelitian terkait debitur dana bergulir ini dapat dilihat lagi perkembangannya melalui tingkat / perbedaan pinjaman (plafon kredit) yang berbeda di antara tiap debitur UMKM guna melihat seberapa besar dampaknya jika UMKM melakukan pinjaman dalam jumlah kecil, maupun dalam jumlah besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. 2017. Pengaruh Pembiayaan Kompetitif Terhadap Upaya Pengurangan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Malang: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 5, No. 2.
- Anisyah, Yulianita. 2011. Analisis Perkembangan Industri Batik Semarang. *Jurnal Ilmiah Diponegoro*.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. Tanpa Tahun. Industri Mikro dan Kecil. <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html#subjekViewTab1>. Diakses pada tanggal 4 April 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK).
- Badan Pusat Statistik, 2016. Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2013. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>. Diakses tanggal 3 November 2017
- Boediono. 1982. *Ekonomi Mikro Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKMK. 2006. Pengkajian Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Yang Berhasil Pengembangan Ekonomi Lokal. Tanpa Kota: *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. No. 2.
- Hamid, Edy. Tanpa Tahun. *Sistem Dan Reformasi Ekonomi Indonesia*. Banten: UT.
- Kara, Muslimin. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar. *Makassar: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 47 No.1, Tahun 2013.
- Kasmir. 2011. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013. http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf. Diakses tanggal 3 November 2017
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi ke-enam. Jakarta: PT. Gelora Aksara Utama.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Putri, Indah Yuliana. 2010. Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh Kredit Dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara. Semarang: *Jurnal Ilmiah Diponegoro*.
- Prasetyo, Eko. 2008. Peran Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. Yogya: *Akmenika UPY*. Vol. 2.
- Prastiany, Prilla. 2015. Analisis Dampak Penyaluran Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo Pada Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidoarjo. Malang: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 3, No.2.
- Pratomo, Tiktik Sartika. dan Abd. Rachman Soejodono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusanti, dkk. 2014. Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember. Jember: *Universitas Jember*.
- Setiawan, Achma Hendra dan Tri Wahyu Rejekiingsih. 2009. Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Semarang: *Jurnal Ekonomi Diponegoro*. Vol. 11 No.2, Halaman 109-115.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kesatu. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekarwo, 2016. *JATIMNOMICS Sebuah Modal Indonesia Incorporated (Pemikiran, Konsep dan Implementasi)*. Surabaya: Gramedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistyaningsih, 2012. *Metode Penelitian Kebidanan Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sun'an, Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supranto, J. 2015. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Surdayanto. Dkk. 2013. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Jakarta: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Skousen, Mark. 2009. *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.
<https://www.bi.go.id/id/tentang.../uu.../UU20Tahun2008UMKM.pdf>.
 Diakses tanggal 12 Desember 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
<http://kemenperin.go.id/download/5181/Undang-Undang-No-3-Tahun-2014-Perindustrian>. Diakses tanggal 4 April 2018

Widayanthi, Luh Ikka. 2012. *Pengaruh Karakteristik Debitur UMKM Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Pundi Bali Dwipa*. Malang: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 1, No.2 .

Widyaresti. Dkk. 2012. Analisis Peran BRI Unit Ketandan Dalam Pemberian Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Semarang: *Jurnal Ekonomi Diponegoro*. Vol 1, No.1 Tahun 2012, Halaman 1-11.



LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Dampak Dana Bergulir Terhadap Pengembangan UMKM

Bagian Satu:

Profil Responden

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik Usaha :
3. Alamat :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jenis Usaha :
6. Lama Berdirinya Usaha :
7. Tanggal Peminjaman Dana Bergulir :
8. Plafon Kredit :



Bagian Kedua:

Petunjuk:

Pertanyaan ini berkaitan dengan usaha dan sumber modal usaha saudara. Dimohon saudara untuk mengisi dengan melingkari jawaban yang telah tersedia sesuai dengan kondisi usaha yang sedang saudara jalani.

*Jawaban yang saudara berikan akan dijaga kerahasiaannya untuk kebutuhan penelitian

A. Modal

1. Sumber modal awal yang digunakan untuk usaha?

- a. Modal Sendiri
- b. Pinjaman Bank
- c. Orang Tua
- d. Teman
- e. lain-lain

2. Modal awal yang digunakan untuk memulai usaha?

- a. < Rp. 1.000.000
- b. Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000
- c. Rp. 5.000.000 – Rp. 25.000.000
- d. Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000
- e. > Rp. 50.000.000

3. Besar dana yang didapatkan dari Dana Bergulir?

- a. < Rp. 25.000.000
- b. Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000
- c. Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000
- d. Rp. 100.000.000 – 200.000.000
- e. > Rp. 200.000.000

B. Produksi

1. Berapa jumlah unit produksi dalam sekali produksi?

.....

2. Berapa jumlah unit produksi antara sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir?

	Sebelum meminjam	Sesudah meminjam
Produksi		

C. Tenaga Kerja

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM ini?

.....

2. Berapa unit barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam satu hari?

.....

3. Berapa jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir?

	Sebelum meminjam	Sesudah meminjam
Tenaga Kerja		

D. Pendapatan

1. Berapa rata-rata pendapatan usaha (laba kotor) dalam satu bulan?

a. < Rp. 2.000.000

d. Rp. 10.000.000 – Rp. 25.000.000

b. Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000

e. > Rp. 50.000.000

c. Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000

2. Berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha selama satu bulan?

a. < Rp. 2.000.000

d. Rp. 10.000.000 – Rp. 25.000.000

b. Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000

e. > Rp. 50.000.000

c. Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000

3. Bagaimana pendapatan yang diperoleh antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dana bergulir?

	Sebelum meminjam	Sesudah meminjam
Pendapatan		